



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



TINDAKLANJUT IMPLEMENTASI HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025



2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



REKAPITULASI TINDAKLANJUT LHE AKIP

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137

Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>, Pos-el bapendasumateraselatan@gmail.com

Palembang, 2 Juni 2026

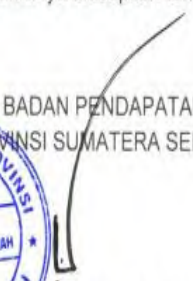
Nomor : 050/1/000651/Penda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025

Kepada
Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di
Palembang

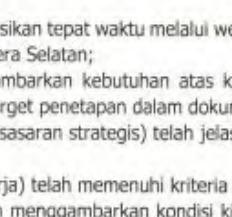
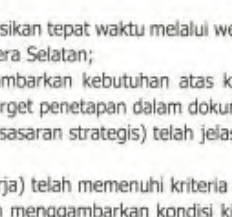
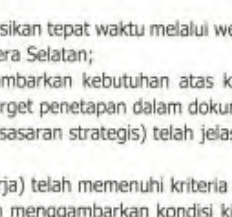
Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/41/AA.04/2026 tanggal 12 Mei 2026 Hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025, bersama ini kami sampaikan dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk dokumen *softcopy evidence* TL Hasil Evaluasi AKIP 2025 tersebut telah kami unggah pada tautan ini : <https://s.id/LHE-TL-AKIP-KEMENPAN-BAPENDASS>.

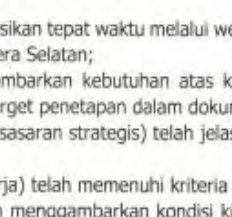
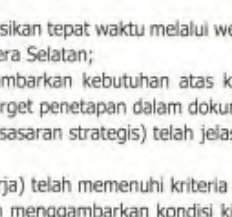
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

Lampiran : 1 Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
Nomor : 050/1/000651/Penda/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

NO	RESPONDEN PENILAIAN LHE		KINDIRI STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARU	KEGIATAN/USI RASIKATAN	WAKTU KENYUSUSAN	PENANGGUNGJAWAB (PIC/SUPPORT)	STATUS/RE DORESE PIVYELANA	BUKTI DAKUN	KEY
	Temuan/Caratan	Rekomendasi										
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
A. PERENCANAAN KINERJA												
1.	Salah satu indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi dari pada serta dampaknya, dalam mencapai kinerja yang telah ditentukan. Selain itu, dalam proses pencapaian kinerja, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Sebagai dasar untuk kerja sama, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Jumlah dokumen yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	1.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Belum		
2.	Salah satu indikator kinerja belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Sebagai dasar untuk kerja sama, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Jumlah dokumen yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	10.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Belum		
3.	Salah satu indikator kinerja belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Sebagai dasar untuk kerja sama, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Jumlah dokumen yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	1.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan II dan III	Sekretariat Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Belum		

4.	Salah satu indikator kinerja belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Sebagai dasar untuk kerja sama, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Jumlah dokumen yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	1.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Belum		
5.	Salah satu indikator kinerja belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Sebagai dasar untuk kerja sama, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	Jumlah dokumen yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya terdapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja yang telah direncanakan.	1.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Belum		

Palembang, 02 Juni 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

Lampiran 2 : Surat Kepala Bapenda Prov. Sumsel
Nomor : 050/1/000651/Penda/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

- Perencanaan kinerja yang disusun telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang memenuhi kriteria SMART, menggunakan *logica frame work* penyalarsan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta telah memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*):
 - Perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 - Perencanaan kinerja telah di publikasikan tepat waktu melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai sesuai dengan target penetapan dalam dokumen perencanaan;
 - Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran strategis) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
 - Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis);
 - Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
 - Seluruh pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan:
 - Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
 - Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
 - Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih *on the right track*;
 - Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
 - Perbaikan atau penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 - Perbaikan atau penyempurnaan perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik;
 - Sudah ada kepedulian, pemahaman serta komitmen setiap unit atau satuan kerja dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
 - Sudah ada kepedulian, pemahaman serta komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan





Lampiran 3 : Surat Kepala Bapenda Prov. Sumsel
Nomor : 050/1/00651/Penda/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS
DENGAN CAPAIAN INDIKATOR IKU KEPALA DAERAH

A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah: 1,554

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukkan trend yang terus mengalami peningkatan selama periode pengamatan dari mulai tahun 2010 sampai 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kapasitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya. Trend peningkatan indeks kapasitas fiskal daerah ditunjukkan pada Gambar berikut.



Namun secara tahunan (*year on year*) perbandingan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2024 dan tahun 2025 mengalami penurunan dari indeks 1,894 menjadi indeks 1,554 hal ini disebabkan karena kondisi:

1. Penerapan opsen PKB dan opsen BBN-KB yang dimulai sejak tanggal 05 Januari 2025 yang menerapkan perubahan transfer dana bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintahan Kabupaten/Kota dari bagi hasil menjadi pola opsen PKB dan opsen BBN-KB secara *real time* harian yang langsung masuk ke rekening RKUD Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sehingga secara akuntansi pencatatan laporan realisasi pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB tidak dicatat sebagai realisasi pendapatan pajak Pemerintah Provinsi;
2. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan tidak memberatkan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah ekuivalen dengan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB sama seperti pembayaran pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah ekuivalen dengan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB sama seperti pembayaran pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dampak terhadap pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB mengalami penurunan;

3. Namun secara total pendapatan pajak daerah per jenis pajak daerah dijelaskan pada Tabel berikut.

NO.	JENIS PAJAK	CAPAIAN KINERJA TA. 2025		
		TARGET	REALISASI	%
1.	PKB	771.441.317.847,00	778.888.270.431,00	100,97
2.	BBN-KB	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
3.	PBB-KB	1.473.535.793.624,00	1.719.840.624.162,49	116,72
4.	PAP	26.540.973.333,00	45.139.844.782,29	170,08
5.	PAJAK ALAT BERAT	6.000.000.000,00	3.874.594.593,00	64,58
6.	PAJAK ROKOK	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
7.	OPSEN MBLB	27.874.543.495,00	16.506.805.333,05	59,22
JUMLAH		3.833.367.486.607,00	3.927.846.336.223,83	102,46

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pendapatan pajak daerah mengalami surplus dari target sebesar Rp. 94.478.849.616,83 atau sebesar 2,46 %

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19809232000121001





REKAPITULASI TINDAKLANJUT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el : sumsel@sumselprov.go.id

KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : Tahun 2026
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RE NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			Format sudah sesuai, data sudah menyediakan dan mendeskripsikan penjelasan dalam laporan
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi	√		
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumseprov.go.id, Pos-elsumsel@sumseprov.go.id

Palembang, 2 Maret 2026

Nomor : B-100.1.6.1/0526/VII/2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP Pemerintah Prov.
Sumse Tahun 2025

Kepada Yth .
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota, Unit Organisasi Eselon I sampai dengan Unit Kerja Mandiri harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir dan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB RI Tahun 2025.

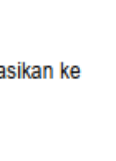
Sehubungan dengan hal tersebut diatas , diminta kepada Saudara untuk segera menginput data dimaksud :

1. pada Aplikasi esr.menpan.go.id yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
 - b. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 - c. Renstra
 - d. IKU
 - e. Pohon Kinerja (lainnya)
 - f. Rencana Kinerja Tahunan / Renja 2026
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah agar di publikasikan ke media sosial Perangkat Daerah/sumseprov.go.id.

Data poin 1 dan 2 di input / sampaikan paling lambat 30 Maret 2026.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



A



REKOMENDASI PERENCANAAN KINERJA

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





REKOMENDASI PERENCANAAN KINERJA

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja	
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT	
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Berkala Waktu	1.	Melaksanakan orientasi kinerja (evaluasi kinerja TA. 2025 dan orientasi kinerja TA. 2026) serta penyusunan Perjanjian Kinerja
	2.	Pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026
	3.	Pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2026
	4.	Laporan aksi Triwulan I Tahun 2026 (KITAB Triwulan I Tahun 2026)
	5.	Laporan aksi Triwulan II Tahun 2026 (KITAB Triwulan II Tahun 2026)
	6.	Laporan LKjIP Triwulan I Tahun 2026
	7.	Laporan LKjIP Triwulan II Tahun 2026





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAPORAN ORIENTASI KINERJA 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://dapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 06 Januari 2026

Nomor : 050/1/000345/Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Orientasi Kinerja
Dan Penyusunan PK Tahun 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslit
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Kerja Internal Orientasi Kinerja
Dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Aula Sriwijaya
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.





NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL ORIENTASI KINERJA PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026)**, telah diadakan rapat koordinasi internal mengenai orientasi kinerja dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

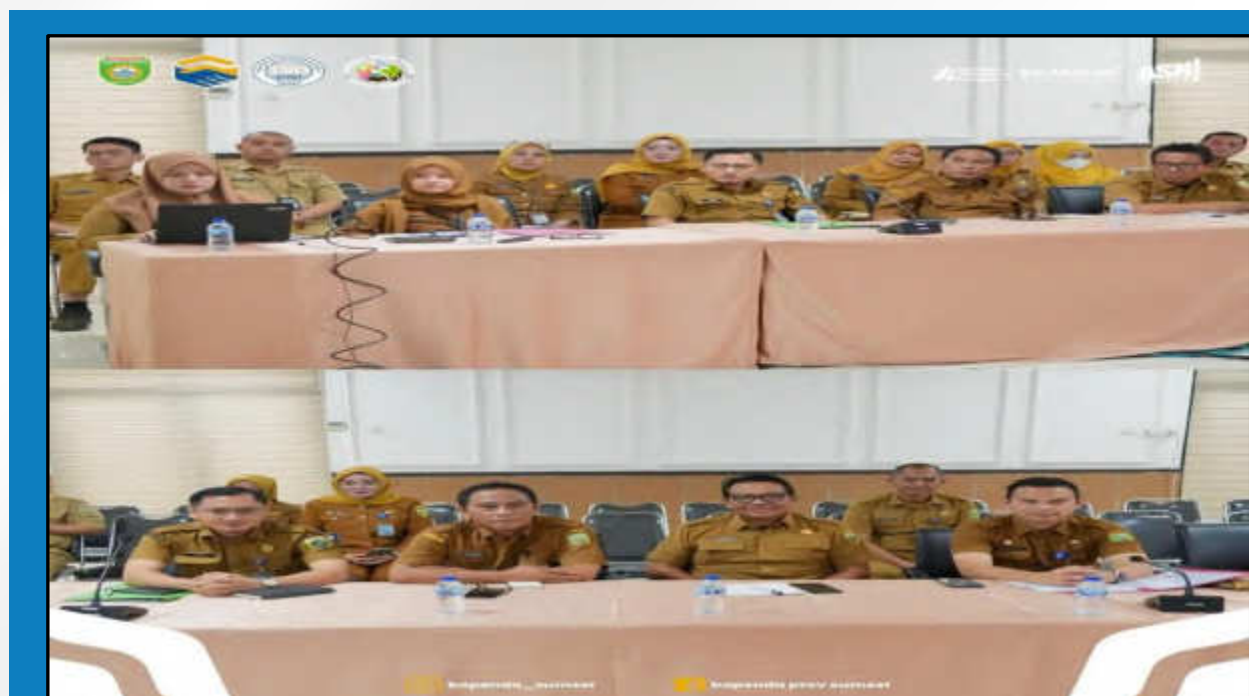
A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : **Senin, 12 Januari 2026**
Waktu : **Pukul 09:00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Ruang Rapat Aula Sriwijaya Bapenda**
Acara : **Rapat Koordinasi Internal Orientasi Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. Achmad Rizwan	Ka. Bapenda.	
2			
3	Mohandha Karim, S.S.H.	Kab. gencik biro operasi	
4	ANDI TRONO	STAF TANLUK	
5	Syahrimi	Kabs. PEP Bapenda	
6	Yulia Susanti	Bidang Pajak	
7	Yerk A.	P. pers. Keljura	
8	YUUTO	P. PATUN	
9	Ma-dalena	Bid. Wasbin	
10	Jusmaini	Bid Wasbin	
11	HEBU GAWAWW	EDU. UPK Pusit	
12	Roni Karniadar	Ksbg Keuangan	
13	Redho Octaviano SR	Pa Patda	
14	RINA SYARIPUDDIN	Ko Tu Banyuasin II	
15	VITRAUS	Pasid. Pajak	
16	Lovi Andrian	Pasid. wasbin	
17	Adi Paladika	P2 patda	
18	ZIZWAN DERI	POLL	
19	PURWADI	PUSHA	
20	EKKI APRIANUDI	Kab. UK	
21	Ruliyanti Amelia	PEP	
22	Tri Gustiani	PEP	
23	Vina Aprilia	PEP	
24	M. IIP RANA PRAJA	STAF SUBBAG PEP	
25	Reka Purnamasari	STAF SUBBAG PEP	





REKOMENDASI 01 PERENCANAAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAHAN RAPAT KERJA INTERNAL ORIENTASI KINERJA

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang
12 Januari 2026

SASARAN KINERJA | **BAPENDA SUMSEL**

Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRE
Indikator RPJPD Sumsel 2025 - 2045

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator Sasaran RPJMD Sumsel 2025 - 2029

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah
Persentase Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi
Persentase Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi

Meningkatnya Pengawasan Pajak Daerah
Frekuensi Pengawasan Pajak Daerah

Penguatan Basis Pajak Daerah
Persentase Meningkatnya Basis Pajak Daerah

Sasaran Kinerja

TANTANGAN UNTUK MENCAPAI SASARAN KINERJA

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

1. Penurunan Pendapatan Asli Daerah
2. Penyesuaian Tarif Pajak Daerah
3. Perubahan Sistem Bagi Hasil Pajak Daerah Ke Kabupaten/Kota menjadi Sistem Opsen
4. Perubahan Potensi Per Jenis Retribusi Daerah

ISU STRATEGIS

TANTANGAN YANG DI HADAPI

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi	Meningkatnya Pengawasan Pajak Daerah	Penguatan Basis Pajak Daerah
Perubahan Tarif Pajak Daerah Terutama Tarif PKB dan Tarif BBN-KB sebagai adanya <u>Kebijakan Opsen</u> PKB dan Opsen BBN-KB Belum optimalnya pendapatan pajak daerah dengan indikator masih terdapatnya tunggakan pajak daerah Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak daerah	Penerapan <u>Opsen</u> PKB dan Opsen BBNKB, penghapusan BBNKB II dan Penghapusan Pajak Progresif	Pengendalian dan pengawasan pajak daerah belum optimal dilakukan sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Database pajak dan retribusi yang belum di <u>mutakhirkan</u> secara berkala, sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi belum terpetakan dengan baik

SOLUSI PEMECAHAN MASALAH			
GRAND STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah DEREGULASI 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 22 Desember 2023. 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah tanggal 08 Mei 2024. 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah tanggal 08 Mei 2024. 4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Pemberian Keringanan dan / atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan.	Meningkatnya Pengawasan Pajak Daerah TRANSFORMASI DIGITALISASI 1. Aplikasi Samsat Online Sumatera Selatan (SOSL). Perubahan Aplikasi Samsat Online Sumsel telah di laksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 terkait dengan tarif pajak daerah, Opsi PKB dan Opsi BBNKB. 2. Aplikasi Hunter PKB. Aplikasi khusus yang dibangun untuk mengingatkan wajib pajak akan tunggakan atas Pajak PKB. 3. Sektor Retribusi, "R065" Payment System and Realtime Rapd Dalam Upaya Sinergitas Peningkatan PAD Sektor Retribusi Daerah. 4. Whatsapp Broadcast, pemanfaatan digitalisasi informasi melalui Whatsapp Broadcast sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak akan hal-hal masa pajak. 5. Pengembangan modern channel melalui kerjasama dengan penyedia layanan e-commerce. 6. New E-DEMO, pembayaran pajak yang tersedia di platform digital smartphone, terintegrasi dengan NIK dan Jarak Jari.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi SINERGI DAN KOLABORASI 1. PKS Sinergi Opsi PKB dan Opsi BBNKB Bersama dengan 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. 2. Kerjasama Bermanfaat Nomor Induk Kependudukan untuk penguatan basis pajak daerah dengan Dukcapil. 3. Pengembangan kerjasama dengan pemohon satu pintu kabupaten/kota agar kemudahan yang bersinergitas melakukan jasa pelayanan menggunakan nomor kendaraan yang bermutu di Sumatera Selatan. 4. Pengembangan kerjasama dengan Tim Kajian, bagi pemناه yang tidak pakai akan pajak daerah. 5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pembina Sinergi Tingkat Provinsi Bersama dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharga. 6. Rapat Koordinasi Bersama Badan Pendapatan Daerah 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. 7. Kerjasama Bermanfaat dan Partisipasi Ormas Bersama antara Sapenda Prov. Sumsel dan Kanyid CUP Sumsel.	Penguatan Basis Pajak Daerah PROGRAM INSENTIF FISKAL 1. Tahun 2023, Program pemutihan PKB dan BBNKB dari tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 berupa keringat bebas denda dan bunga pajak PKB dan BBNKB II tunggakan PKB 2 nilai tahun, bebas, bebas denda, 1 tahun untuk pokok tunggakan PKB dan 1 tahun untuk pokok PKB tahun berjalan, pemutihan BBNKB II sebesar 50% termasuk mutasi menuas dan dalam proses jual, Provisi, Sumatera Selatan, penghapusan PKB kendaraan di atas 15 GT sampai dengan 7 GT, pemberian insentif pemotihan denda 10% dan bebas bunga pembekanan PKB dan BBNKB sebesar 0 %. 2. Tahun 2024, Program pemutihan PKB dan BBNKB dari tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 berupa keringat bebas PKB, pemutihan BBNKB II 100% dan seluruhnya, pemotihan pajak pemotihan PKB dan diberikan sanksi administrasi BBNKB II dan seterusnya. 3. Tahun 2024, Program pemberian insentif fiskal berupa keringat tarif PKB-KB dari 7,3 % menjadi 5 %. 4. Tahun 2025, Program insentif fiskal berupa keringat pajak PKB dan BBNKB yang berlaku sama dengan pajak tahun sebelumnya, metode tidak memberikan wajib pajak. 5. Tahun 2025, Insentif Pajak BBNKB II dan Pembebasan Bea Balik Nama Transaksi di Provinsi Sumsel. 6. Tahun 2025, Updating Basis Data Pajak Daerah.

ORIENTASI KINERJA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (BAHAN PAPARAN)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 09 April 2026

Nomor : 050/II/ 000424/Penda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TW I 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di
Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Sriwijaya Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TW I 2026

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001





NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-04-2026), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2026

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	DR. H. AHMAD RIZWAN, S.STR, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
2	H. DERGA KARENZA, S.P. M. M	Sekretaris Badan	
3	MARENDRA OKA WIJAYA	KABID P2PATDA	
4	HJ. SIXTA LUSANTI, SE, M.M	KABID WASBIN	
5	Wahyu Septadi	Physis	
6	Ferry H	Pusli a	
7	ADR R	PDLL	
8	ETA. S	KAS. PEMBORUAN	
9	Yulia Susanti	Kasi sengketa pague & Dolean	
10	KRENTY	KSO HIGAH X PAKERIN Lant	
11	SYAHIMI	KASUBBAG PEP	
12	PURWANDI	PUSLI a	
13	AMALKA	Pojah	
14	MARDAIENA	WASBIN	
15	Jusmaini	Wasbin	
16	Mayasari	"	
17	Meilan	"	
18	Devi	"	
19	Neni	"	
20	Triana	"	
21	Nia	"	
22	Nahma	"	
23	Anggrini	"	
24	Safarudin	Keuangan	





RAPAT KERJA INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

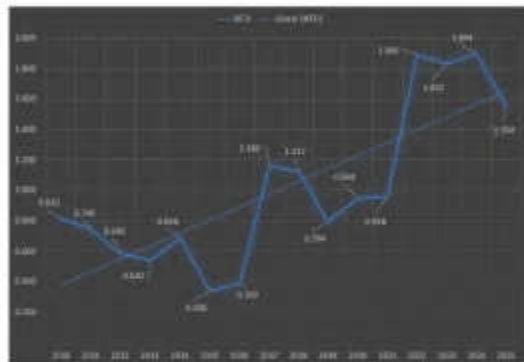
Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

Triwulan I Tahun 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



TANTANGAN KINERJA FISKAL DAERAH



Kinerja indeks kapasitas fiskal daerah selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun menunjukkan trend peningkatan, walaupun kondisi 2024 ke 2025 mengalami penurunan

Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sehingga hasil pengkajian dampak baru dirasakan 1 (satu) tahun

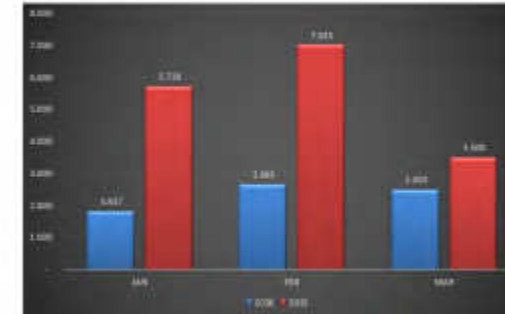
2026



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Perbandingan kinerja (month-to-month) Indeks kapasitas fiskal daerah pada Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan penurunan kinerja, karena perlambatan kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pada Triwulan I Tahun 2026, indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,493 Indeks, kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,500. Namun dengan indeks kapasitas fiskal sebesar 2,493 masih dalam kategori tinggi



BADAN PENDAPATAN DAERAH

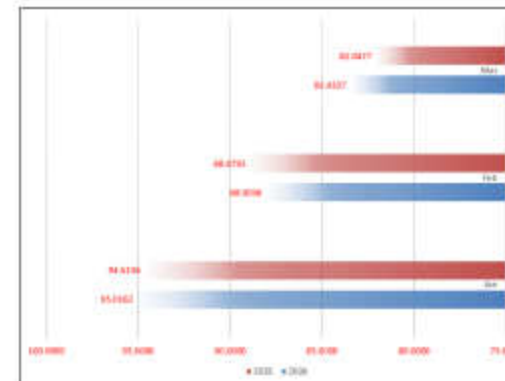


SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1 IKSS. 1 Revenue Mobilization

Perbandingan kinerja (month-to-month) IKSS. 1 Revenue Mobilization pada Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan kinerja (mendekati garis normal), karena Realisasi PAD terus meningkat sehubungan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKSS. 1 Revenue Mobilization sebesar 83,43 %, kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 82,04 %. Namun dengan indikator Revenue Mobilization ini sebesar 83,43 % masih dalam batas kewajaran (mendekati garis normal).



BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya



Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan



2026

REKOMENDASI

1

Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

2

Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi

3

Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai



4

Segera melaksanakan dan perbalkan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2026 namun tetap dalam koridor dan kaldah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5

Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2026

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I (BAHAN PAPARAN)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 01 Juli 2026

Nomor : 050/1/00077411/Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslit
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Kerja Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


D. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBAKUTAMA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.





NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**08-07-2026**), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2026

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. ACHMAD RIZWAN, S.STP.,M.M	KEPALA BADAN	
2	H. B.		
3	Wahyu Septadi	Physo	
4	Derry Kurnia	POLL	
5	Gyahrini	Ksbs PEP	
6	Heli Ghuana	Ks. tv uph Ma	
7	Indriana	Koror Pte 2	
8	Firnas Wairim	Ma. VPTB Pte. 1	
9	Dimas Firmansyah	Palembang 4	
10	ZIZWAN DERI	POLL	
11	Ustadia Disgatera	POLL	
12	M. Ibrahim.	Plg. IV	
13	Adi Baladika	P2PATDA	
14	YULITA	P2 PATPA	
15	Jusmaini	Wasbin	
16	MARDALETA	wasbin	
17	Eta Sumarti	PAJAK	
18	Yogre H.p.	wasbin	
19	Eki	Sekretariat	
20	Andani Novial	POLL	
21	Idham Kuali	PUSIA	
22	Xulia Susanti	Pajak	
23	Haital	Pajak	
24	Pakby tish	Pajak	
25	FIRMANA	P2PATDA	





BAHAN RAPAT KERJA INTERNAL

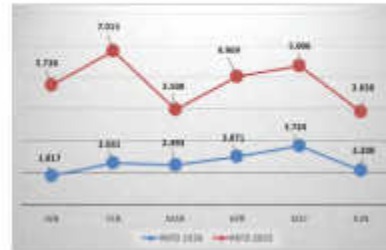
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN EVALUASI

- **Identifikasi Masalah**
Evaluasi kinerja yang masih terkategori masih rendah dan/atau belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi
- **Fokus Tindaklanjut**
Akselerasi pencapaian rencana target serta di dukung percepatan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan dengan daya serap yang masih rendah

01 TUJUAN PERANGKAT DAERAH



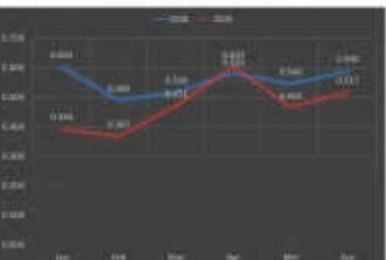
Kinerja indeks kapasitas fiskal daerah sepanjang Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Menurunnya daya beli masyarakat;
- b. Perlambatan kinerja pendapatan PKB dan BBNKB karena pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta equivalent;
- c. Dari sisi beban belanja pegawai, gaji PPPE sebagai tambahan belanja pegawai dalam struktur APBD;
- d. Secara akuntansi, pencatatan realisasi PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara real time langsung split payment ke RKUD Kabupaten/Kota

Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah turun sebesar **1,458 point** apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta turun sebesar **0,293 point** apabila dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2026

03 SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

IKSS. 2 Kemandirian Fiskal



Kinerja IKSS. 2 Kemandirian Fiskal pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- a. Peningkatan realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026;
- b. Pelaksanaan kegiatan SIGUNTANG-MENYAPA setiap hari selasa;
- c. Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan door to door service

Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.2 Kemandirian Fiskal sebesar **59,00 %** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **51,80 %** (mendekati garis normal), kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **51,70 %**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

OPTIMALISASI

1. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat
2. Melakukan upaya diversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah
3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah

SINERGI

1. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah;
2. Melaksanakan pendataan kendaraan bermotor melalui SIGUNTANG MENYAPA setiap hari selasa
3. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat

MANAJEMEN RISIKO

1. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi Critical Success Factor (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang

REKOMENDASI

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah
3. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi cross-cutting dalam upaya mencapai target kinerja
4. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal
5. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan
6. Berikan punishment terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan preventif terlebih dahulu serta reward pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.





B

REKOMENDASI PENGUKURAN KINERJA

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





REKOMENDASI **PENGUKURAN KINERJA**

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT
Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan	1. Menyusun Sistem dan Prosedure Pengukuran Kinerja
	2. Membuat kertas kerja pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 per indikator
	3. Membuat kertas kerja pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026 per indikator
	4. Penajaman alur proses Standar Operasional Prosedur (SOP)
	5. Penyelarasan sasaran strategis dengan program
	6. Membuat rincian aktivitas dari rencana aksi





SISTEM PROSEDURE PENGUKURAN KINERJA
BAPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG
TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026												
Tujuan	1	Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah										
Indikator	1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah										



REKOMENDASI 02 PENGUKURAN KINERJA

NSRF DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Memungkainya Kapasitas Fiskal Daerah				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		
		Memungkainya Pemerataan Pendapatan Dari Perencanaan Awal			Arus/realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD		
			Memungkainya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Memungkainya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Pajak

					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Efisiensi Fisikal Daerah			Indeks Efisiensi Fisikal Daerah			
			Meningkatnya upaya eksplorasi, dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengalihan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah		Persentase peningkatan pendapatan daerah	Reg.1	Eguitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembalian Pajak daerah dan Kelengkapan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembalian Pajak Daerah, serta Penyusunan	

7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pembentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,21	10	25	45	12,21	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	102.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20	40	30	10
									Pelaksanaan door to door service	Minimnya petugas lapangan yang berbasis kompetensi juru sita	2.196.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
									Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	540.800.000	2 kali	Bidang Pajak	25	30	25	20
8.	Meningkatnya Kredit/Nilai Penyerapan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Desasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	6,90	0,5	2,5	2,0	1,0	Efektifitas penyerapan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	546.003.720	1 kali	Bidang P2PATDA	15	30	45	10
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PORB	1.1 Persentase Rasio PAD Terhadap PORB Non Migas	%	0,98	0,2	0,4	0,5	0,06	Diversifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya tunggakan penyerahan pajak daerah	540.800.000	1 kali	Bidang Pajak	25	10	55	10
		1.2 Rasio PAD Terhadap PORB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	0,12	1,1	0,3	0,2	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	342.700.000	2 kali	Bidang Pajak	30	30	50	10

ALUR PROSES SOP

PENYELARASAN SASARAN STRATEGIS DENGAN PROGRAM

RINCIAN AKTIVITAS RENCANA AKSI

2026

SOP PENGUKURAN KINERJA





REKOMENDASI **PENGUKURAN KINERJA**

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah	
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT	
Telah disusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	1.	Menyusun alur proses SOP Pengumpulan Data Kinerja
	2.	Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS)
	3.	Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan
	4.	Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

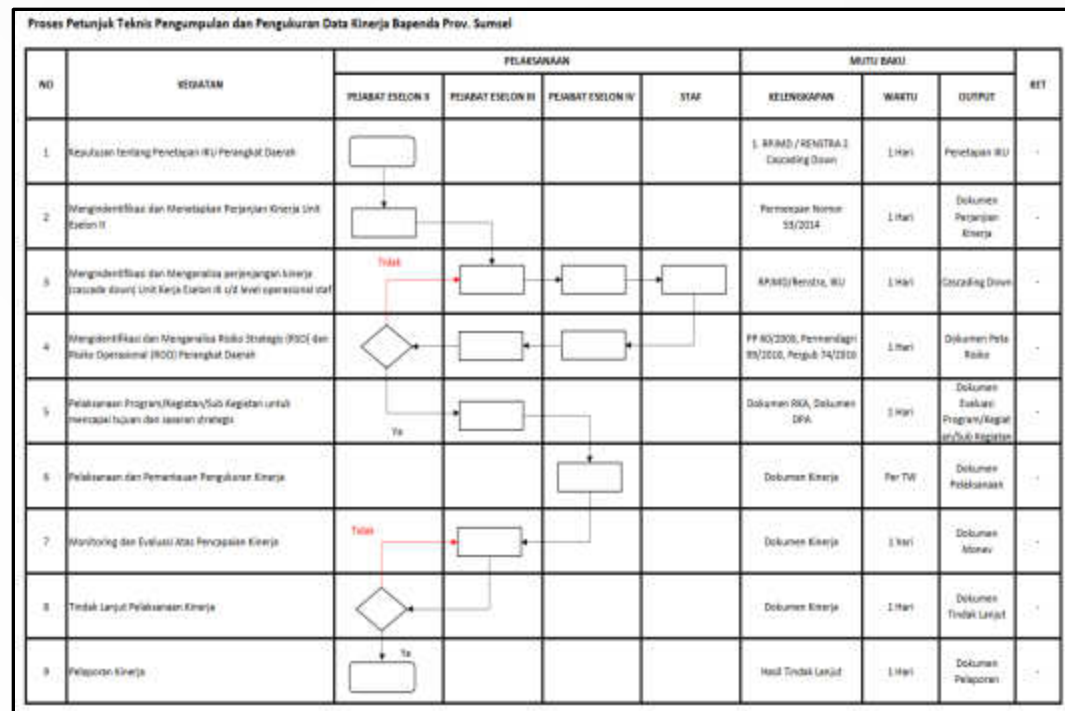




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI 02 PENGUKURAN
KINERJA

ALUR PROSES SOP



DATA LRA BPKAD

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2	BELANJA MODAL	3.569.651.835.172,00	3.527.146.154.482,36	84,87	3.503.672.013.451,71
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.519.000.000,00	3.516.154.000,00	34,98	701.091.453,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Merawat	352.274.664.866,00	296.906.222.053,00	84,87	272.576.659.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.346.525.609,00	252.573.106.777,36	141,41	240.181.034.813,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	848.422.192.312,00	703.188.894.968,00	82,88	699.676.948.706,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.731.184.000,00	66.400.406.979,00	90,06	66.349.063.436,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.060.254.365,00	4.030.356.145,00	76,85	3.785.192.804,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.569.651.835.172,00	3.527.146.154.482,36	84,87	3.503.672.013.451,71
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.344.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.344.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	29.344.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.628.456.750.251,39	82,83	4.294.405.699.896,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.048.080.940.377,00	1.806.130.908.101,00	88,26	2.309.426.901.096,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.867.518.555.615,00	1.335.345.842.150,30	71,57	1.836.976.788.838,23
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	18.000.000.000,00	57.060.000.000,00	316,94	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.628.456.750.251,39	82,83	4.294.405.699.896,25
	JUMLAH BELANJA	11.237.619.654.088,00	5.690.237.627.574,89	50,56	10.908.424.497.431,90
	SURPLUS/DEFISIT	(108.494.651.207,00)	973.024.957.824,43	(344,64)	56.863.727.503,00
6	PEMBAYARAN DAERAH	108.494.651.207,00	108.494.651.207,34	100,00	11.635.923.704,34
6.1	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207,34	100,00	134.808.628.930,91
6.1.01	Dana Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00	108.494.651.207,34	100,00	134.808.628.930,91
	JUMLAH PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207,34	100,00	134.808.628.930,91
6.2	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
6.2.02.04	Pembayaran Program dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	103.177.705.206,55
	PEMBAYARAN NETTO	108.494.651.207,00	108.494.651.207,34	100,00	51.630.923.704,34
	DANA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	482.415.609.333,79	0,00	108.494.651.207,34

SURAT Ka. BAPENDA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpom : (0711) 318633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumateraprov.go.id>

Palembang, 24 Januari 2026

Nomor : DSU/ /Penda/2026
Klasifikasi : Baku
Lampiran :
Hal : Permohonan Data LRA

Kepada :
Yth. : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

di
Palembang

Merindukanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Salah satu indikator pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun dan menganalisa indikator dengan data perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025 untuk data per tanggal 23 Januari 2026 (unsuited).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M.
PENDEK UTAMA MADYA (IV/d)
RUP. 19810923 200012 1 001

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpom : (0711) 318633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumateraprov.go.id>

Nomor : DSU/ /Penda/2026
Klasifikasi : Baku
Lampiran :
Hal : Permohonan Data LRA

Palembang, 30 Januari 2026

Yth. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Selanjutnya dengan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor DSU/2000056/Penda/2026 perihal permohonan data PDRB Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung upaya Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta analisis indikator kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Terkait permohonan tersebut, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan metodologi penghitungan PDRB yang berlaku secara nasional, BPS menyediakan data PDRB dalam periode Tahunan dan Triwulanan. Data PDRB dalam periode Bulanan tidak tersedia
3. Bersama ini kami lampirkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dalam periode Triwulanan (Triwulan I s.d. III) untuk dipergunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut
4. Kami informasikan bahwa data PDRB Triwulan IV akan dirilis pada tanggal 5 Februari 2026 dan PDRB Tahunan akan dirilis bersamaan dengan rilis Publikasi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2026 pada tanggal 27 Februari 2026, data tersebut akan dirilis pada website BPS Provinsi Sumatera Selatan (alamat url terlampir)

Dalam rangka mendukung WBK dan WBKM, BPS Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjaga integritas dan memegang teguh nilai-nilai ASH BerAKHLAK. Apabila dalam pelayanan kami terdapat penyimpangan/pelanggaran kode etik, mohon perhatian melaporkan melalui nomor go id, email : asas@bps.go.id atau WA : 0813-3379-3485.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

Muh Wanyu Yulianto

Data Pajak Daerah dari Website DJPK

Filter Data APBD

Periode : Tahun : Wilayah : Sub wilayah :
Berkas :
Cari

POSTUR APBD
Se Pro. Sumal

Tahun 2025

Jumlah Data APBD yang diterima 988 di periode

Kategori Data APBD dari Periode, tahun APBD adalah data realisasi tahun

Item	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	41.881,11.8	40.884,21.4	97,61
PAJ	10.031,24.8	4.833,01.4	48,18
Pajak Daerah	1.077,01.9	1.042,01.4	96,73
Retribusi Daerah	162,01.9	168,01.9	103,70
Hasil Penghasilan Pajak dan Penghasilan	438,01.9	388,01.9	88,58
Lain-lain PAD yang lain	500,01.9	1.460,01.4	292,00

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpom : (0711) 318633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumateraprov.go.id>

Palembang, 24 Januari 2026

Nomor : DSU/ /Penda/2026
Klasifikasi : Baku
Lampiran :
Hal : Permohonan Data

Kepada :
Yth. : Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

di
Palembang

Merindukanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Salah satu indikator pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun dan menganalisa indikator kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap komponen pertumbuhan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon bantuan data dan informasi PDRB tahun 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M.
PENDEK UTAMA MADYA (IV/d)
RUP. 19810923 200012 1 001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Data PDRB dari Website BPS

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2024

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tahunan

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	94.104,00	94.824,40	93.434,00	94.892,36	376.994,84
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.476,39	3.784,00	3.884,87	3.441,00	14.586,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.026,40	10.188,01	9.702,04	10.789,04	47.705,49
4. Pengeluaran Konsumsi Sektor Publik	50.000,87	50.282,84	50.000,00	54.000,00	204.283,71
5. Pengeluaran Konsumsi	6,46	3,20	6,54	0,00	16,20
6. Net Export Barang dan Jasa	-14.701,00	-4.701,00	9.001,71	-4.374,00	-14.701,00
Produk Domestik Regional Bruto	107.490,00	115.263,46	117.028,59	116.900,40	450.682,45

SURAT BPS

SUMBER: WEB DJPK KEMENKEU

SURAT Ka. BAPENDA

DATA WEB RESMI BPS

2026

PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA
KINERJA





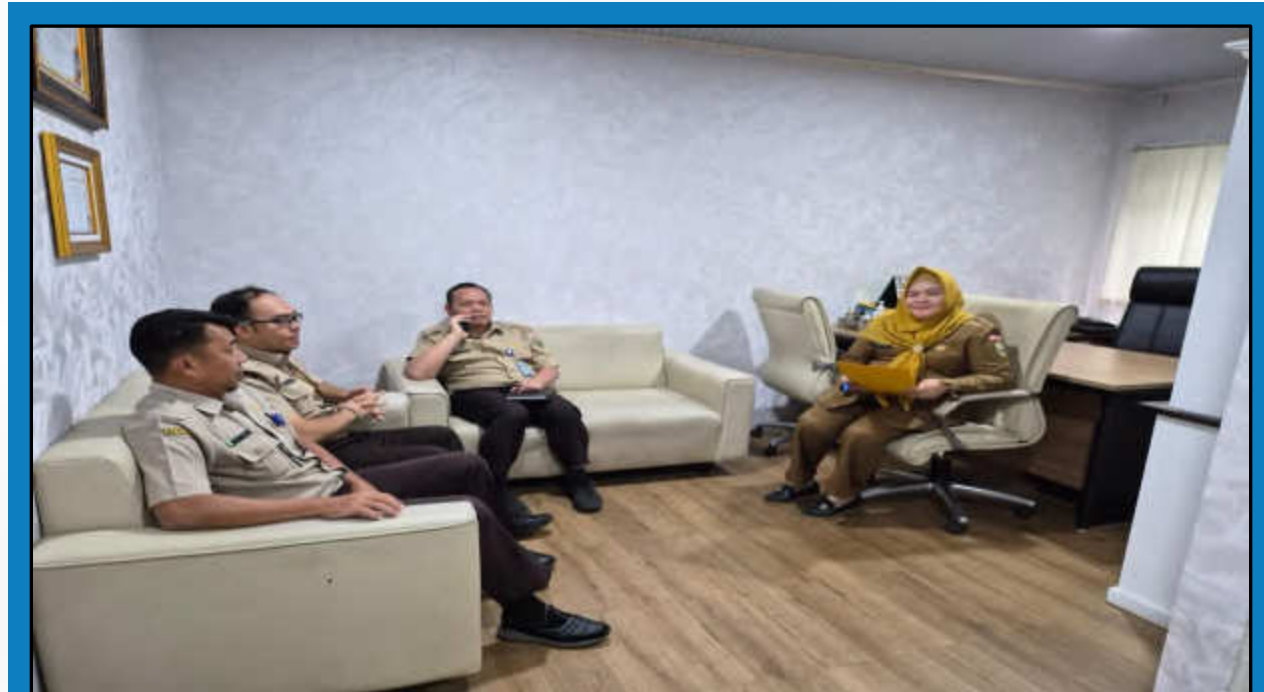
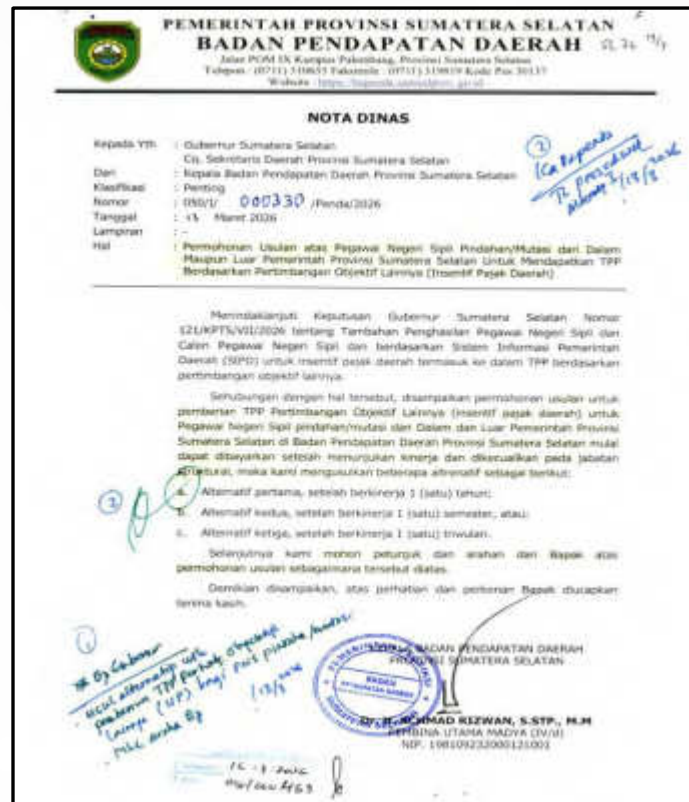
REKOMENDASI **PENGUKURAN KINERJA**

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah	
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT	
Meminta arahan ke Pimpinan terkait dengan kinerja yang dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan	1.	Menyampaikan nota dinas meminta arahan Gubernur Sumatera Selatan
	2.	Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPP POL)
	3.	Rapat kerja internal terkait dengan isu strategis pemberian <i>reward and punishment</i> dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPP POL)





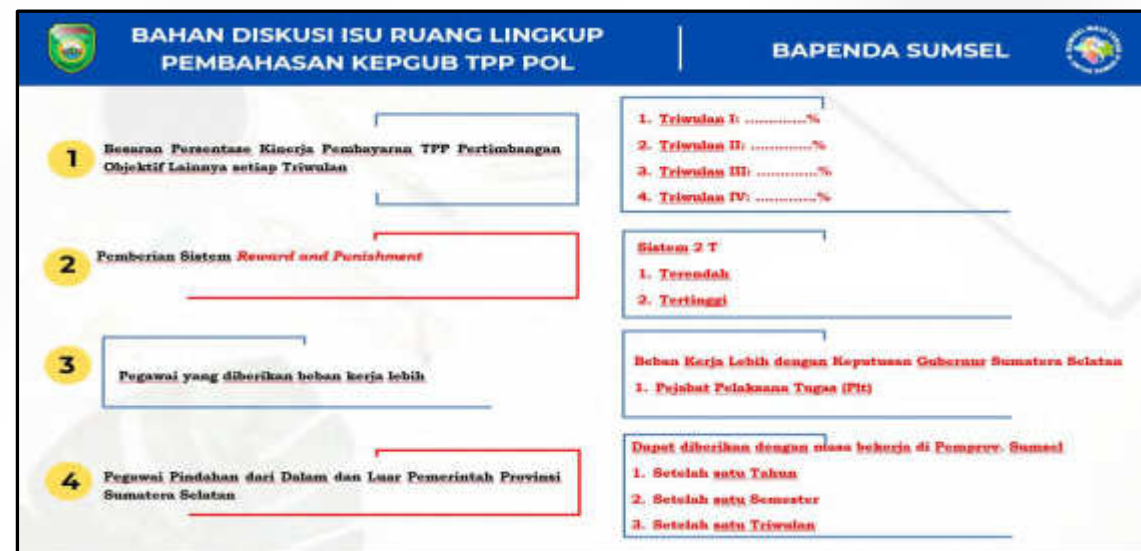
ARAHAN GUBERNUR TERKAIT TPP POL



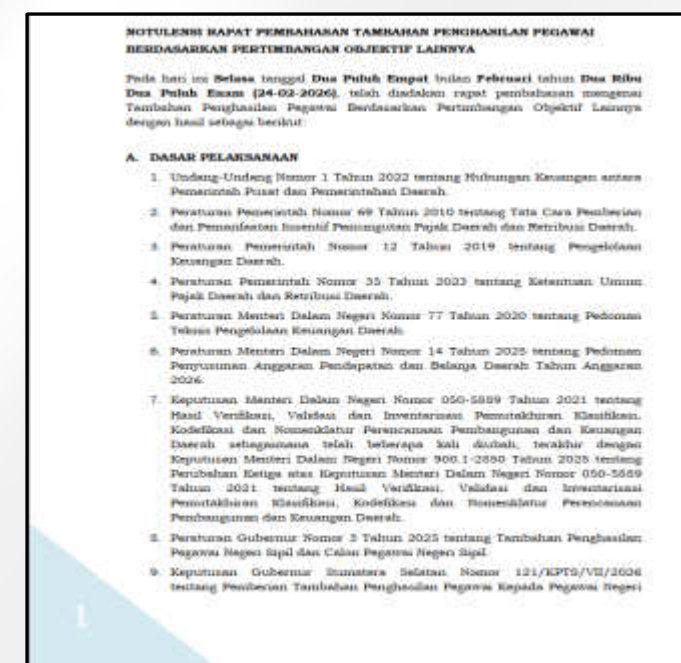
KOORDINASI DENGAN BIRO ORGANISASI



BAHAN RAPAT TPP POL



ISU PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT



NOTULEN RAPAT

2026

PENGUKURAN KINERJA BELUM MENJADI DASAR TUNJANGAN KINERJA (TPP POL)





REKOMENDASI **PENGUKURAN KINERJA**

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) organisasi	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT
Meminta arahan ke Pimpinan terkait dengan kinerja yang dijadikan dasar penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK)	1. Menyampaikan nota dinas meminta arahan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel
	2. Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK)
	3. Rapat kerja internal terkait dengan isu strategis perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) dan perubahan kewenangan UU 1 Tahun 2022 HKPD





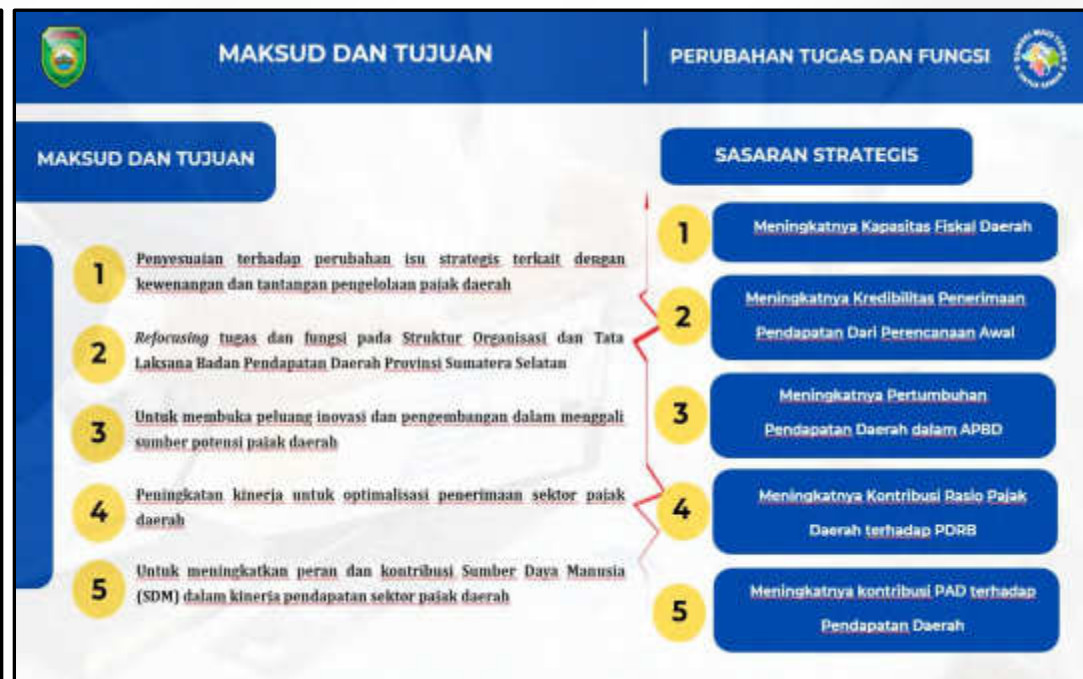
ARAHAN SEKRETARIS DAERAH



KOORDINASI DENGAN BIRO ORGANISASI



RAPAT KERJA INTERNAL TERKAIT ISU PERUBAHAN SOTK



BAHAN PAPARAN

2026

PENGUKURAN KINERJA BELUM MENJADI
DASAR PENYESUAIAN SOTK





KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN SOTK

KERANGKA ACUAN KERJA

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada sektor penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah

NO.	KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	
	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
5.	Pajak Rokok	Pajak Rokok
6.		Pajak Alat Berat
7.		Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak daerah yang diserahkan ke Pemerintahan Provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu berdiskusi dalam menggali sumber yang menjadi potensi penerimaan pajak daerah. Kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai kemandirian fiskal daerah.

NOTULENSI RAPAT

NOTULENSI RAPAT PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada sektor penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tabel 1.1 berikut:

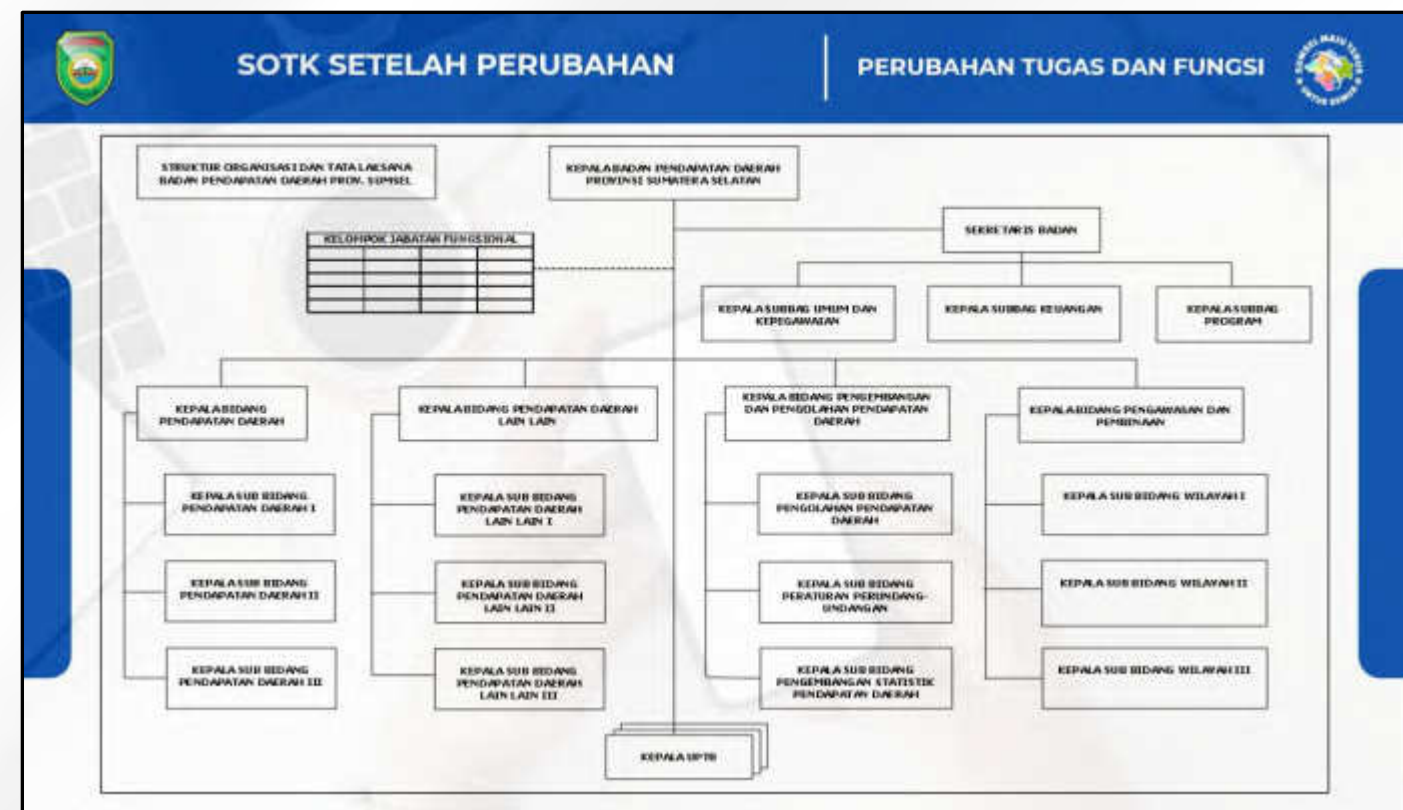
Tabel 1.1

Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah

NO.	KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	
	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
5.	Pajak Rokok	Pajak Rokok
6.		Pajak Alat Berat
7.		Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak daerah yang diserahkan ke Pemerintahan Provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu berdiskusi dalam menggali sumber yang menjadi potensi penerimaan pajak daerah. Kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai kemandirian fiskal daerah.



2026

PENGUKURAN KINERJA BELUM MENJADI
DASAR PENYESUAIAN SOTK





REKOMENDASI **PENGUKURAN KINERJA**

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Dokumen pengukuran kinerja tidak hanya di dasarkan dari pengukuran atas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga di dasarkan dari pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT
Pengukuran kinerja telah dilakukan penyesuaian atas realisasi kinerja	1. Menyusun LKjIP Triwulan I Tahun 2026
	2. Menyusun LKjIP Triwulan II Tahun 2026
	3. Membuat kertas kerja Triwulan I Tahun 2026 per indikator
	4. Membuat kertas kerja Triwulan II Tahun 2026 per indikator





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Triwulan II Tahun 2026



IKSS. 4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0,34 mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,16. Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 1,03

IKSS. 5 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 58,99 lebih baik pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 51,78. Kondisi ini juga lebih baik apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 51,69

IKSS. 6 Realisasi PAD

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6, Realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 41,30 kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 16,56. Namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 48,31

IKSS. 7 Kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0,25 lebih baik apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,12. Namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,70

IKSS. 8 Kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8, kontribusi PAD terhadap PDRB PKPD pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0,72 lebih baik apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,35. Namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2,20

Triwulan II Tahun 2026

RINGKASAN KINERJA

Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan Perangkat Daerah, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami kontraksi penurunan, Indeks 2,20 dari Triwulan I Tahun 2026 Indeks 2,49. Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini juga mengalami penurunan indeks 2,20 dari Triwulan II Tahun 2025 dengan Indeks 3,65

IKSS. 1 Revenue Mobilization

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1, Revenue Mobilization, pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 58,69 semakin membaik apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 83,43 (semakin mendekati garis normal). Namun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 49,70

IKSS. 2 Indeks Kemandirian Fiskal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2, Indeks Kemandirian Fiskal Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0,59 lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0,51. Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini juga lebih baik apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,51

IKSS. 3 Pertumbuhan Pendapatan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3, pertumbuhan pendapatan pada Triwulan II Tahun 2026 masih mengalami pertumbuhan negative sebesar 17,18 kondisi ini belum baik apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar negative 3,37. Kinerja ini belum baik apabila dibandingkan pada periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar negative 7,44

REKOMENDASI 02 PENGUKURAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Triwulan II Tahun 2026

RINGKASAN KINERJA

TUJUAN PD

Indikator Tujuan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tercapai indeks 2,200

SASARAN STRATEGIS

IKSS. 1 Nilai Deviasi 58,69	IKSS. 2 Kemandirian Fiskal 0,59	IKSS. 3 Pertumbuhan Pendapatan (17,19)	IKSS. 4 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 0,341
IKSS. 5 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah 58,99	IKSS. 6 Realisasi PAD 41,302	IKSS. 7 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas 0,256	IKSS. 8 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah 0,725

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

PENGLOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PENGLOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

REALISASI

Rp. 68.376.201.300,00

Rp. 10.31.216,00

Rp. 386.428.027,00

31,24 %

8,54 %

6,84 %

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- Sinergi dan Kolaborasi
- Pengawasan Berbasis Risiko

STRATEGIC DIRECTION STATEMENT:

Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat wajib pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Daerah

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Pelaksanaan SIGUNTANG MENYAPA
- Pendaftaran dan Validasi Kendaraan Bermotor
- Door to Door Service
- Operasi Gabungan Bersama Stakeholder
- Penagihan Pajak Daerah

2026

PENGUKURAN KINERJA ATAS REALISASI
KINERJA





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI 02 PENGUKURAN
KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026					
Tujuan	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah				
Indikator	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah				

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 850,245,439,419.81	Rp 2,119,766,534,740.43	Rp -	Rp -
2	TRD	Rp 791,723,913,116.00	Rp 1,473,298,861,188.00	Rp -	Rp -
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LUPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	SLPA	Rp 356,547,473,832.97	Rp 1,212,239,403,547.20	Rp -	Rp -
Total		Rp 1,998,516,826,368.78	Rp 4,805,304,799,475.63	Rp -	Rp -

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSLU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	OTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 565,275,863,730.00	Rp 1,284,001,430,740.00	Rp -	Rp -
5	BHH	Rp 23,935,903,540.00	Rp 696,188,794,073.08	Rp -	Rp -
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Total	Rp 589,165,767,270.00	Rp 1,980,186,224,813.08	Rp -	Rp -

		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah		Rp 1,409,351,059,098.78	Rp 2,825,114,574,659.65	Rp -	Rp -
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah		2.493	2.200	#DIV/0!	#DIV/0!

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 255,787,714,620.69	Rp 615,693,471,321.08	Rp 850,245,439,419.81	Rp 1,415,781,762,667.60	Rp 1,752,394,954,924.06	Rp 2,119,766,534,740.43	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	TRD	Rp 168,244,167,100.00	Rp 643,077,014,000.00	Rp 791,723,913,116.00	Rp 1,458,631,938,988.00	Rp 1,473,298,861,188.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LUPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	SLPA	Rp 201,855,105,222.69	Rp 783,521,700.97	Rp 356,547,473,832.97	Rp 1,245,249,518,433.69	Rp 1,736,133,277,468.83	Rp 1,212,239,403,547.20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 625,886,986,943.38	Rp 1,759,549,006,042.05	Rp 1,998,516,826,368.78	Rp 3,683,545,923,839.29	Rp 4,947,555,231,980.89	Rp 4,805,304,799,475.63	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	OTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 222,176,776,498.00	Rp 344,050,821,480.00	Rp 565,275,863,730.00	Rp 824,368,098,984.00	Rp 976,953,151,481.00	Rp 1,284,001,430,740.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	BHH	Rp -	Rp -	Rp 23,935,903,540.00	Rp 327,847,610,750.66	Rp 331,637,021,705.38	Rp 696,188,794,073.08	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 222,176,776,498.00	Rp 344,050,821,480.00	Rp 589,165,767,270.00	Rp 1,152,215,709,740.66	Rp 1,308,591,173,186.38	Rp 1,980,186,224,813.08	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 403,710,710,445.38	Rp 915,498,182,562.05	Rp 1,409,351,059,098.78	Rp 2,531,730,214,095.63	Rp 3,638,568,348,133.91	Rp 2,825,114,574,659.65	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1.817	2.661	2.493	3.071	3.724	2.200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

$$KFD_{\text{Desember}}^* = \text{PAD} + \text{TKD} + \text{PTAD} + \text{LUPS} + \text{SLPA} - (\text{OTSS} + \text{DTI} + \text{DAS} + \text{BP} + \text{BHH} + \text{BB} + \text{Pembayaran Pokok PUD})$$

Diketahui:
OTSS = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD = Pendapatan Asli Daerah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
LUPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SLPA = Sisa Lebih Penyelesaian Anggaran
OTSS = Dana Otonomi Khusus
DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
DAS = Dana Insentif
BP = Belanja Pegawai
BHH = Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$KFD_{\text{Desember}}^* = \frac{KFD_{\text{Desember}}}{\text{Rasio Kapasitas Fiskal Daerah}}$$

Keterangan:

KFD_{Desember}^* = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
 KFD_{Desember} = Kapasitas Fiskal Daerah
 $\text{Belanja Pegawai}_{\text{Desember}}^*$ = Belanja Pegawai

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

SSJ	Meningkatnya Kememandirian Fiskal Daerah
KSS	Indeks Kememandirian Fiskal Daerah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TRGP	Rp 348,778,014,000.00	Rp 708,046,321,600.00	Rp -	Rp -
2	Trw	Rp 373,689,009,216.00	Rp 530,341,240,638.00	Rp -	Rp -
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 69,256,889,900.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp -	Rp -
Total		Rp 791,723,913,116.00	Rp 1,473,298,861,188.00	Rp -	Rp -

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REVow	Rp 850,245,439,419.81	Rp 2,119,766,534,740.43	Rp -	Rp -
5	Trw	Rp 348,778,014,000.00	Rp 708,046,321,600.00	Rp -	Rp -
3	Trw	Rp 373,689,009,216.00	Rp 530,341,240,638.00	Rp -	Rp -
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 69,256,889,900.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp -	Rp -
Total		Rp 1,641,969,352,535.81	Rp 3,593,065,395,928.43	Rp -	Rp -

		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kememandirian Fiskal		0.4822	0.4100	#DIV/0!	#DIV/0!
IKF Invers		0.5178	0.5900	#DIV/0!	#DIV/0!

$$\left(\frac{[TRGP + TRGP + B + REVSH]}{REVOR + TRGP + TRGP + B + REVSH} \right)$$

IKF adalah Indeks Kememandirian Fiskal
TRGP adalah General Purpose Transfer (DAD), Dana Otonomi Khusus, Dana
Kontinuitas, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi
Hasil dan Bantuan Keuangan)
TRSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
B adalah Subsidized Borrowing (Penyerasan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kabupaten
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

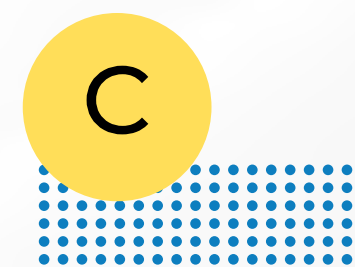
No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 116,259,338,000.00	Rp 232,518,676,000.00	Rp 348,778,014,000.00	Rp 465,037,352,000.00	Rp 697,556,028,000.00	Rp 708,046,321,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Trw	Rp 11,285,215,100.00	Rp 369,853,713,000.00	Rp 373,689,009,216.00	Rp 426,851,326,638.00	Rp 526,164,612,038.00	Rp 530,341,240,638.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 40,699,614,000.00	Rp 40,699,614,000.00	Rp 69,256,889,900.00	Rp 131,025,964,100.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 168,244,167,100.00	Rp 643,077,013,000.00	Rp 791,723,913,116.00	Rp 1,022,914,642,738.00	Rp 1,458,631,938,988.00	Rp 1,473,298,861,188.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	REVIEW	Rp 255,787,714,620.00	Rp 615,693,471,321.08	Rp 850,245,439,419.81	Rp 1,415,781,762,667.60	Rp 1,752,394,354,924.06	Rp 2,119,766,534,740.43	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	TRW	Rp 116,259,338,000.00	Rp 232,518,676,000.00	Rp 348,778,014,000.00	Rp 465,037,352,000.00	Rp 697,556,028,000.00	Rp 708,046,321,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	TRW	Rp 11,285,215,100.00	Rp 369,853,713,000.00	Rp 373,689,009,216.00	Rp 426,851,326,638.00	Rp 526,164,612,038.00	Rp 530,341,240,638.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 40,699,614,000.00	Rp 40,699,614,000.00	Rp 69,256,889,900.00	Rp 131,025,964,100.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp 234,911,298,950.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 426,031,881,720.00	Rp 1,258,765,484,321.08	Rp 1,641,969,352,535.81	Rp 2,438,696,405,405.60	Rp 3,211,026,293,912.06	Rp 3,593,065,395,928.43	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

No.	Uraian	Jumlah												
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	November	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
	Indeks Kememandirian Fiskal Daerah	0.397	0.511	0.482	0.419	Rp	0.454	0.410	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	IKF Invers	0.603	0.489	0.518	0.581		0.546	0.590	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



REKOMENDASI PELAPORAN KINERJA

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN





REKOMENDASI PELAPORAN KINERJA

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI	
Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Jadwalkan pembahasan laporan kinerja sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana kerja masing-masing indikator kinerja	
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT	
Pengukuran kinerja telah dilakukan penyesuaian atas realisasi kinerja	1.	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
	2.	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026
	3.	Evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2026
	4.	Evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2026
	5.	Penyusunan Laporan Aksi (KITAB Triwulan I Tahun 2026)
	6.	Penyusunan Laporan Aksi (KITAB Triwulan II Tahun 2026)
	7.	Pengukuran kinerja telah membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2010 s.d 2025) per indikator





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 09 April 2026

Nomor : 050/II/000424/Penda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TW I 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Sriwijaya Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TW I 2026

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001





NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-04-2026), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Selasa, 14 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2026

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	DR. H. AHMAD RIZWAN, S.STR, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah	
2	H. DERGA KARENZA, S.P. M. M	Sekretaris Badan	
3	MARENDRA OKA WIJAYA	KABID P2PATDA	
4	HJ. SIXTA LUSANTI, SE, M.M	KABID WASBIN	
5	Wahyu Septadi	Physis	
6	Ferry H	Pusli a	
7	ADR R	PDLL	
8	ETA. S	KAS. PEMBORUAN	
9	Yulia Susanti	Kasi sengketa pague & Dolean	
10	KRENTY	KSO HIGAH X PAKSIPIU Lant	
11	SYAHIMI	KASUBBAG PEP	
12	PURWANDI	PUSLI a	
13	AMALKA	Pojah	
14	MARDAIENA	WASBIN	
15	Jusmaini	Wasbin	
16	Mayasari	"	
17	Meilan	"	
18	Devi	"	
19	Neni	"	
20	Triana	"	
21	Nia	"	
22	Nahma	"	
23	Anggi	"	
24	Safarudin	Keuangan	





RAPAT KERJA INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

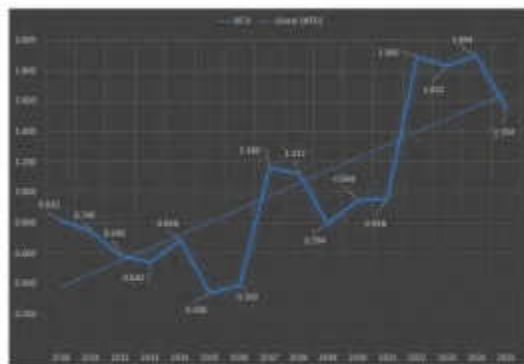
Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

Triwulan I Tahun 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



TANTANGAN KINERJA FISKAL DAERAH



Kinerja indeks kapasitas fiskal daerah selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun menunjukan trend peningkatan, walaupun kondisi 2024 ke 2025 mengalami penurunan

Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sehingga hasil pengkajian dampak baru dirasakan 1 (satu) tahun

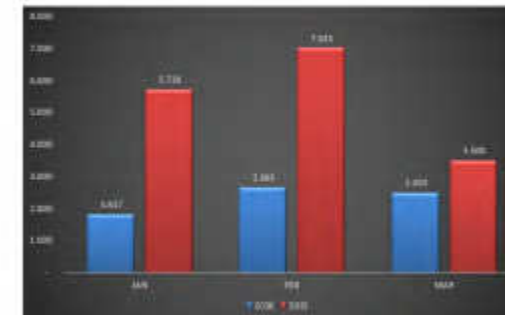
2026



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Perbandingan kinerja (month-to-month) Indeks kapasitas fiskal daerah pada Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 menunjukan penurunan kinerja, karena perlambatan kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pada Triwulan I Tahun 2026, indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,493 Indeks, kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,500. Namun dengan indeks kapasitas fiskal sebesar 2,493 masih dalam kategori tinggi



BADAN PENDAPATAN DAERAH

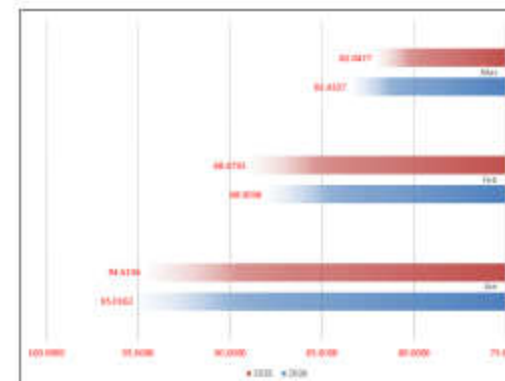


SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1 IKSS. 1 Revenue Mobilization

Perbandingan kinerja (month-to-month) IKSS. 1 Revenue Mobilization pada Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 menunjukan peningkatan kinerja (mendekati garis normal), karena Realisasi PAD terus meningkat sehubungan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKSS. 1 Revenue Mobilization sebesar 83,43 %, kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 82,04 %. Namun dengan indikator Revenue Mobilization ini sebesar 83,43 % masih dalam batas kewajaran (mendekati garis normal).



BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN



Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya



Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan



2026

REKOMENDASI

- 1 Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
- 2 Pelaksanaan door to door service dan operasi gabungan bersama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi
- 3 Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai



4

Segera melaksanakan dan perbalkan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2026 namun tetap dalam koridor dan kaldah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5

Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2026

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I (BAHAN PAPARAN)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 01 Juli 2026

Nomor : 050/1/00077411/Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslita
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Kerja Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


D. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.





NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**08-07-2026**), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari / tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2026

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. ACHMAD RIZWAN, S.STP.,M.M	KEPALA BADAN	
2	H. B.		
3	Wahyu Septadi	Phn	
4	Derya Kurnia	POLL	
5	Gyahrini	Ksbs PEP	
6	Heli Ghuana	Ks. tv uph Ma	
7	Indriana	Koror Pk 2	
8	Firnas Wairim	Ma. VPTB Pk. 1	
9	Dimas Firmansyah	Palembang 4	
10	ZIZWAN DERI	POLL	
11	Ustadia Disgatera	POLL	
12	M. Ibrahim.	Plg. IV	
13	Adi Baladika	P2PATDA	
14	YULITA	P2 PATPA	
15	Jusmaini	Wasbin	
16	MAF DALETA	wasbin	
17	Eta Sumarti	PAJAK	
18	Yogre H.p.	wasbin	
19	Eki	Sekretariat	
20	Andani Novial	POLL	
21	Idham Kuali	PUSIA	
22	Xulia Susanti	Pajak	
23	Haital	Pajak	
24	Robby tish	Pajak	
25	FIRMANA	P2PATDA	





BAHAN RAPAT KERJA INTERNAL

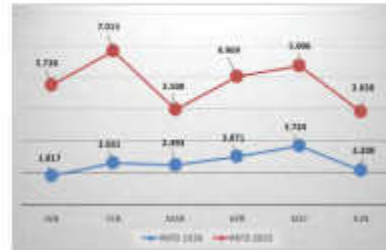
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN EVALUASI

- **Identifikasi Masalah**
Evaluasi kinerja yang masih terkategori masih rendah dan/atau belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi
- **Fokus Tindaklanjut**
Akselerasi pencapaian rencana target serta di dukung percepatan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan dengan daya serap yang masih rendah

01 TUJUAN PERANGKAT DAERAH



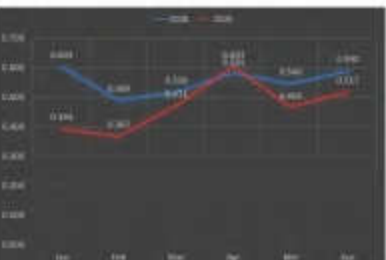
Kinerja indeks kapasitas fiskal daerah sepanjang Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Menurunnya daya beli masyarakat;
- b. Perlambatan kinerja pendapatan PKB dan BBNKB karena pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta equivalent;
- c. Dari sisi beban belanja pegawai, gaji PPPE sebagai tambahan belanja pegawai dalam struktur APBD;
- d. Secara akuntansi, pencatatan realisasi PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara real time langsung split payment ke RKUD Kabupaten/Kota

Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Daerah turun sebesar **1,458 point** apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta turun sebesar **0,293 point** apabila dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2026

03 SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

IKSS. 2 Kemandirian Fiskal



Kinerja IKSS. 2 Kemandirian Fiskal pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, hal ini di dukung oleh beberapa faktor:

- a. Peningkatan realisasi PAD pada Triwulan II Tahun 2026;
- b. Pelaksanaan kegiatan SIGUNTANG-MENYAPA setiap hari selasa;
- c. Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan door to door service

Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja IKSS.2 Kemandirian Fiskal sebesar **59,00 %** kondisi ini lebih baik dari Triwulan I Tahun 2026 sebesar **51,80 %** (mendekati garis normal), kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **51,70 %**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

OPTIMALISASI

1. Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat
2. Melakukan upaya diversifikasi pajak daerah dengan kegiatan promosi dan sosialisasi pajak daerah
3. Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah

SINERGI

1. Sinergi dan kolaborasi bersama Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Optimalisasi Pendapatan Daerah;
2. Melaksanakan pendataan kendaraan bermotor melalui SIGUNTANG MENYAPA setiap hari selasa
3. Pemberian insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investor sehingga ruang kapasitas fiskal daerah semakin meningkat

MANAJEMEN RISIKO

1. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi Critical Success Factor (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang

REKOMENDASI

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Melakukan uji petik revidi atas kinerja yang berkontribusi kecil terhadap peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah
3. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi cross-cutting dalam upaya mencapai target kinerja
4. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal
5. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulanan
6. Berikan punishment terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan preventif terlebih dahulu serta reward pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.





LAPORAN

KINERJA DAN FAKTA BAPENDA (KITAB)

Triwulan II 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA
AKSI TRIWULAN II



Tabel 3.1

Capaian Realisasi Kinerja Unit Eselon II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGKARAN	TRIWULAN II		CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	REALISASI			
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,02	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Putang Pajak	1.422.980.200					
			2,02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	510.000.000	1,01	2,200	217,82	Kepala Badan	
2.	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	84,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	21,00	19,67	93,67	Kepala Badan	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,458	Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000	0,23	0,590	256,52	Kabid P2PATDA	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,28	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000	0,64	(17,19)	(2.685,76)	Kepala Bidang POLL	
5.	Meningkatnya kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,252	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000	0,62	0,341	50,00	Kepala Bidang Pajak	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,89	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	25,02	58,966	235,795	Kepala Bidang Warisan	



Laporan KITAB Triwulan II 2026

Hal III - 37

7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli	92,21	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000				Kepala Bidang Pajak	
				Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	25,00	41,302	165,208	Kepala Bidang Pajak	
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	6,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	2,5	58,698	2.347,92	Kepala Bidang P2PATDA	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	9.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,98	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	0,4	0,256	64,00	Kepala Bidang POLL	
		9.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,18	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	342.700.000	0,12	0,355	295,83	Kepala Bidang Pajak	

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tabel 3.2

Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	KINERJA TRIWULAN II		RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	KEGIATAN TRIWULAN II	
					TARGET	REALISASI						TARGET	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02	1,01	2,200	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sinergi optimalisasi pendapatan bersama dengan Pansus DPRD Prov. Sumsel	1.288.886.060	6 bulan	Sekolah Bidang	10,00	2,58
								Sinergi dan kolaborasi Opsi PKB dan Opsi BBN-KB	546.003.720	17 Kab/Kota	Sekolah Bidang	25,00	0,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	84,07	10,00	12,03	Penugasan kinerja sampai ke level staf pelaksana (cascading)	Evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala waktu	72.600.000	4 kali	Sekolah Bidang	25,00	20,87
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,458	0,23	0,590	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Sinergi dan kolaborasi Opsi PKB dan Opsi BBN-KB	98.500.000	17 Kab/Kota	Bidang P2PATDA	50,00	43,85
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	%	1,28	0,64	(17,19)	Sinergi dan koordinasi pendapatan transfer pusat	Konsolidasi fiskal dengan pemerintah pusat	120.800.000	4 kali	Bidang POLL	15,00	8,54



Laporan KITAB Triwulan II 2026

Hal III - 39

5.	Meningkatnya kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	1,252	0,62	0,341	Pelaksanaan door to door service	Minimnya petugas pengalihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.106.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,51	25,02	58,966	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Optimalisasi objek retribusi daerah	144.000.000	2 semester	Bidang Warisan	10,00	0,27
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,21	25,00	41,302	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	102.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20,00	4,68
							Pelaksanaan door to door service	Minimnya petugas pengalihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.036.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44
							Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	454.000.000	2 kali	Bidang Pajak	25,00	26,16
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	6,00	2,5	58,698	Eksternalisasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	546.003.720	1 kali	Bidang P2PATDA	15,00	0,00
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD	9.1 Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB	%	0,98	0,4	0,256	Diversifikasi penerimaan	Masih rendahnya tunggakan	548.800.000	1 kali	Bidang Pajak	25,00	11,18



Laporan KITAB Triwulan II 2026

Hal III - 40



LAPORAN EVALUASI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA

Triwulan I Tahun 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 2 April 2026

Nomor : 050/I/ 006379 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penilaian Mandiri Kinerja Triwulanan

Kepada
Yth. Seluruh ASN Di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diminta kepada Saudara untuk:

- Melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas perjanjian kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada atasan langsung di awal tahun sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab kinerja pegawai setiap Triwulanan (form terlampir);
- Secara berjenjang, Pejabat Eselon III dan Eselon IV melakukan pembinaan dan evaluasi atas kinerja staf pelaksana yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing;
- Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi E Kinerja BKN, agar mengumpulkan SKP tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahan penilaian mandiri point 1 (satu) setiap tanggal 05 setelah berakhirnya Triwulan pelaporan dan SKP tahun 2025 dapat dikumpulkan ke Sekretaris Badan melalui Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada link <https://bit.ly/PK-Bapenda-Sumsel>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
BEMINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

- Tembusan Yth:
- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
 - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 08 April 2026

Nomor : 050/I/ 00426 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Pusia
di
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hasil evaluasi penilaian mandiri (*self assessment*) kinerja triwulan I tahun 2026. Untuk itu diminta kepada Saudara segera menindaklanjuti perbaikan atas hasil evaluasi penilaian mandiri (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, perbaikan atas hasil evaluasi penilaian mandiri dapat dikumpulkan ke Sekretaris Badan melalui Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan paling lambat tanggal 17 April 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
BEMINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

No	Kategori	Indikator	Skor	Bobot	Nilai	Kategori	Indikator	Skor	Bobot	Nilai	Kategori
1.	Herfungsia Rendah Ad Daerah	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100
2.	Herfungsia Rendah Ad Daerah	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100
3.	Herfungsia Rendah Ad Daerah	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100	Herfungsia Rendah Ad Daerah (HARAD)	100	100	100	100

Palembang, 08 April 2026

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
BEMINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I TAHUN 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	KRITERIA	Catatan Hasil Evaluasi PM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	1. Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	1. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam UU 1/2022 tentang 1927.	Bidang Pajak
				2. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam PP 35/2023 tentang Kefektifan Urutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang P2PATDA
				3. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang POLI disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam Perda 3/2023 tentang Kefektifan Urutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang POLI
				4. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam Perda 3/2023 tentang Kefektifan Urutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang Wasbin
				5. Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil penilaian e-Aspek Indeks penguji	Sekretariat
				6. Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Pusia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi pemerintah daerah	UPTB Pusia
				7. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen SP/SD 2005 - 2025	Bidang Pajak
				8. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang POLI disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen SP/SD 2005 - 2025	Bidang POLI
				9. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen SP/SD 2005 - 2025	Bidang Wasbin

3.	Pelaporan Kinerja	1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	1. Setiap unit/instansi kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja 2. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja 3. Dokumen laporan kinerja telah disusun 4. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan	1. Unit atau satuan kerja mulai memahami dan peduli pentingnya pengukuran kinerja 2. Unit atau satuan kerja mulai memahami dan peduli pentingnya pengukuran kinerja 3. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala per triwulan per bulan 4. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan	
			5. Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan 6. Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu	5. Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan 6. Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu	

Palembang, 08 April 2026

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
BEMINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAPORAN EVALUASI MANDIRI UNIT ESELON III

Triwulan II Tahun 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 30 Juni 2026

Nomor : 050/II/ 000769 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Kinerja Unit Eselon III

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslia
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hasil evaluasi penilaian mandiri kinerja unit Eselon III di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (terlampir).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri tersebut, diminta kepada Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 050/II/000769 /Penda/2026
Tanggal : 30 Juni 2026

HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA ESELON III DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN VII : UPTB PPD Wilayah Palembang I

I. PENDAHULUAN

Penguatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu upaya strategi internal yang terus ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju *good governance* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat wajib pajak daerah Sumatera Selatan, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian tersistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dibangun untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengevaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta mendukung peningkatan pencapaian kinerja Unit Eselon II yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka evaluasi penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja Eselon III perlu dilakukan secara berkala waktu. Evaluasi penilaian mandiri terhadap akuntabilitas kinerja unit Eselon III diharapkan dapat mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Serta untuk terus berkomitmen secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (*outcomes*) yang telah direncanakan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah ditetapkan, bahwa kinerja unit Eselon III merupakan *cascading down* dari kinerja Unit Eselon II yang diturunkan serta menjawab kontribusi kinerja Unit Eselon III mendukung kinerja Unit Eselon II. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan daerah sektor pendapatan pajak daerah, UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan merupakan Unit Kerja Eselon III yang membantu dalam hal pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
7. Tingkatkan pengawasan berbasis risiko dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
8. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
9. Lakukan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);
10. Menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pencapaian atas kinerja, agar risiko sebagai akibat kegagalan dalam proses tidak terjadi dan lakukan pemantauan dan dikendalikan secara kontinu.



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 198109232000121001





PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Triwulan II
2026

LAPORAN
EVALUASI MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,200	217,82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	21,00	19,67	93,67
3.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization)	2,5	58,698	2.347,92
4.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,590	256,52
5.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,64	(17,19)	(2.685,78)
6.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,341	55,00
7.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,996	235,795
8.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25,00	41,302	165,208
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,4	0,256	64,00
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83

Palembang, 17 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	50,00	39,42	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	546.003.720	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10,00	0,00
24.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,62	3,72	0,00	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggakan dalam pembayaran pajak daerah	1.422.980.200	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20,00	0,00
25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	4,14	2,15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NKB	70.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15,00	0,00

Palembang, 17 Juli 2026

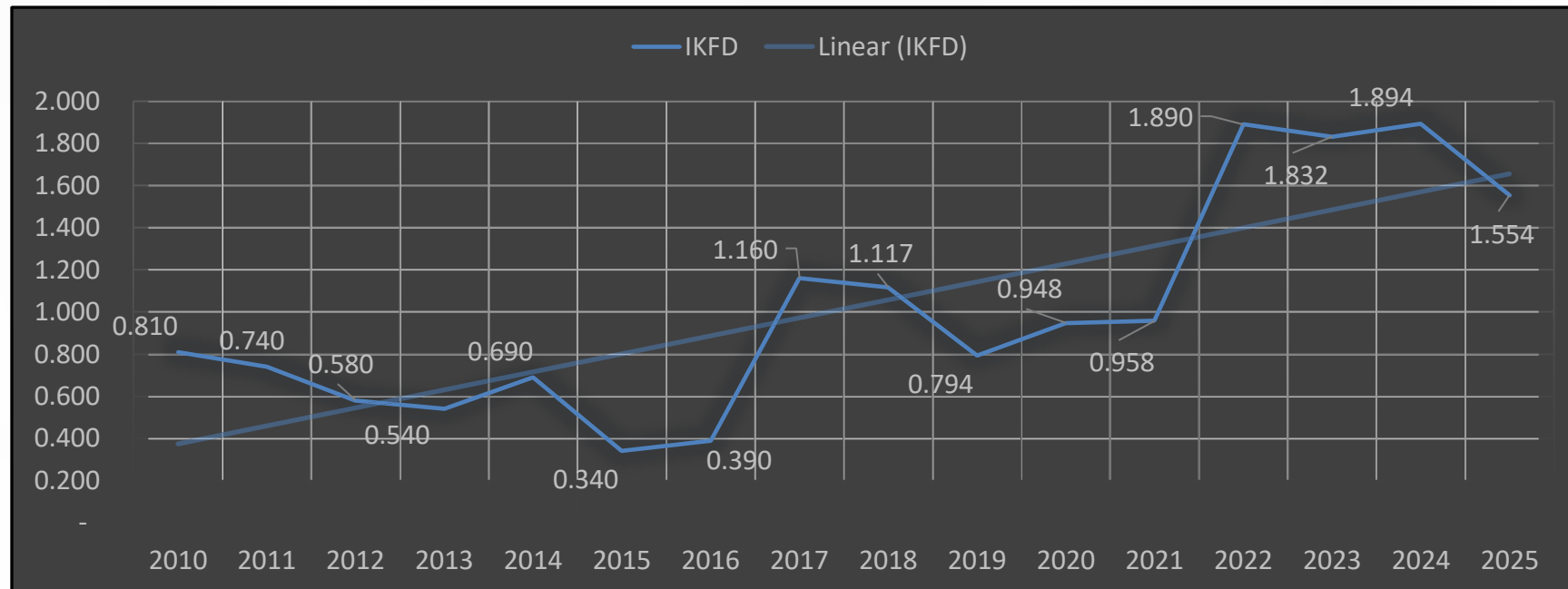
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

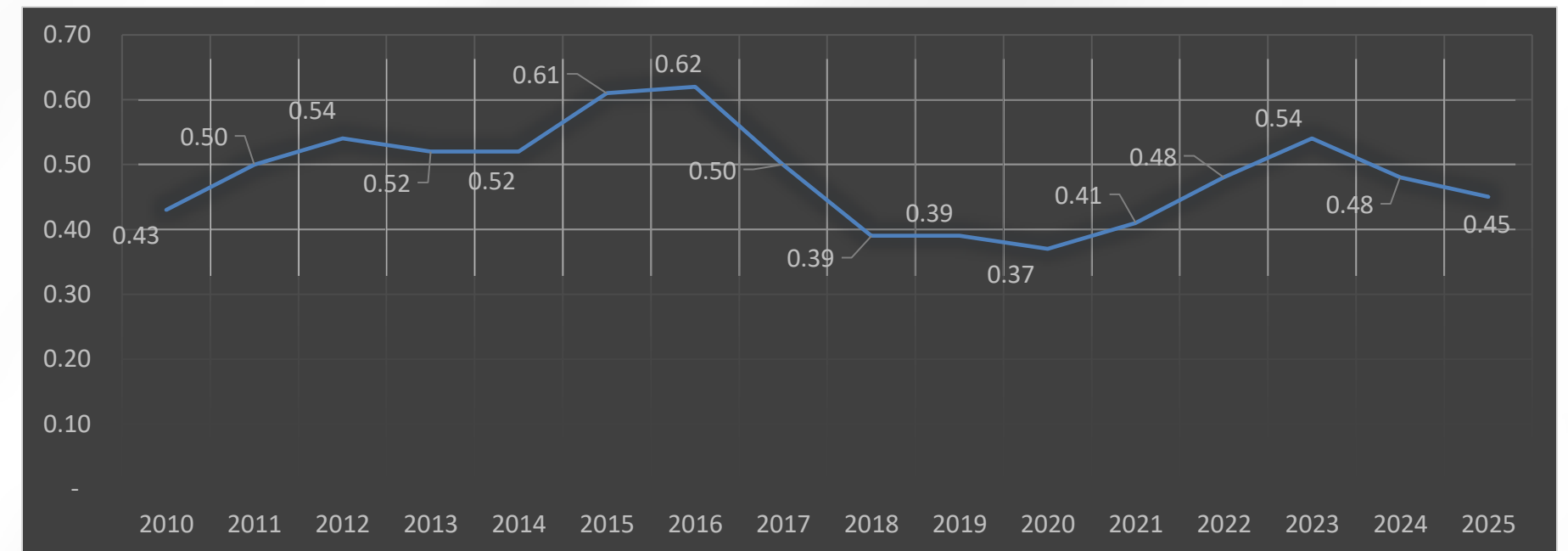
EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	KRITERIA	Catatan Hasil Evaluasi PM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Perencanaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	1. Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	1. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam UU 1/2022 tentang HKPD	Bidang Pajak
				2. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang P2PATDA
				3. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam Perda 3/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang PDLL
				4. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan cascading dan cross-cutting internal dan eksternal	Bidang Wasbin
				5. Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil penilaian e-kinerja individu pegawai	Sekretariat
				6. Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi pemerintah daerah	UPTB Puslia
			2. Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Panjang	1. Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang Pajak
				2. Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang P2PATDA
				3. Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indikator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang PDLL

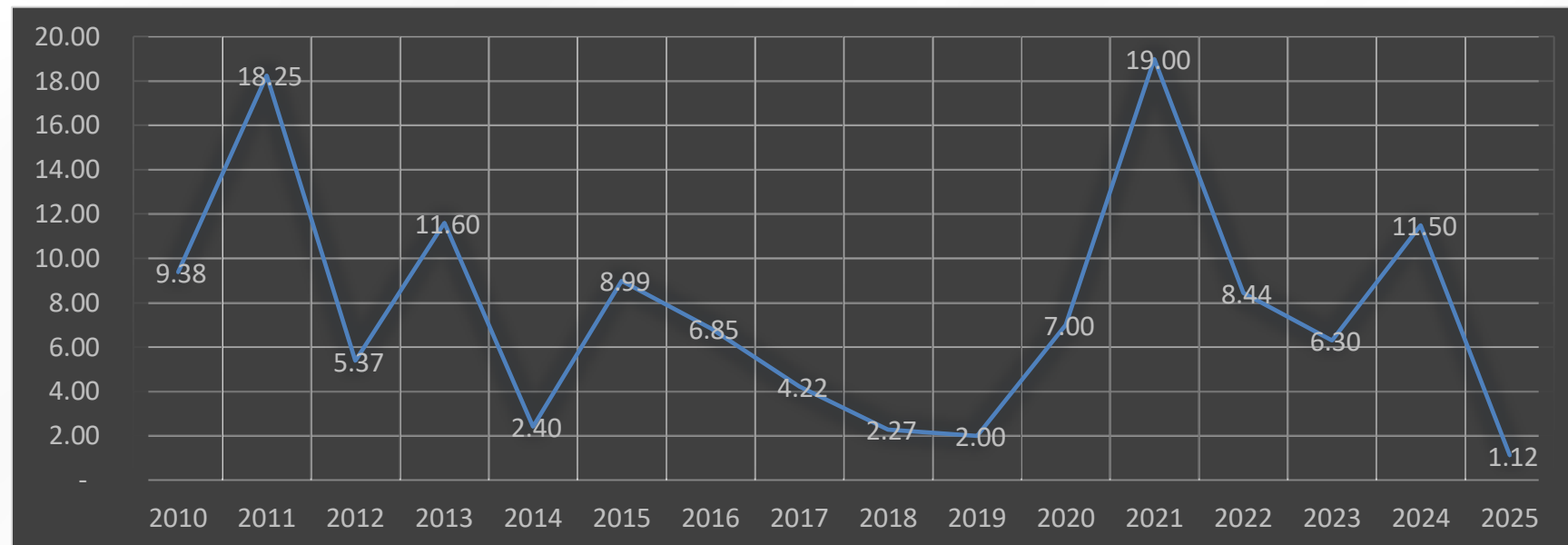




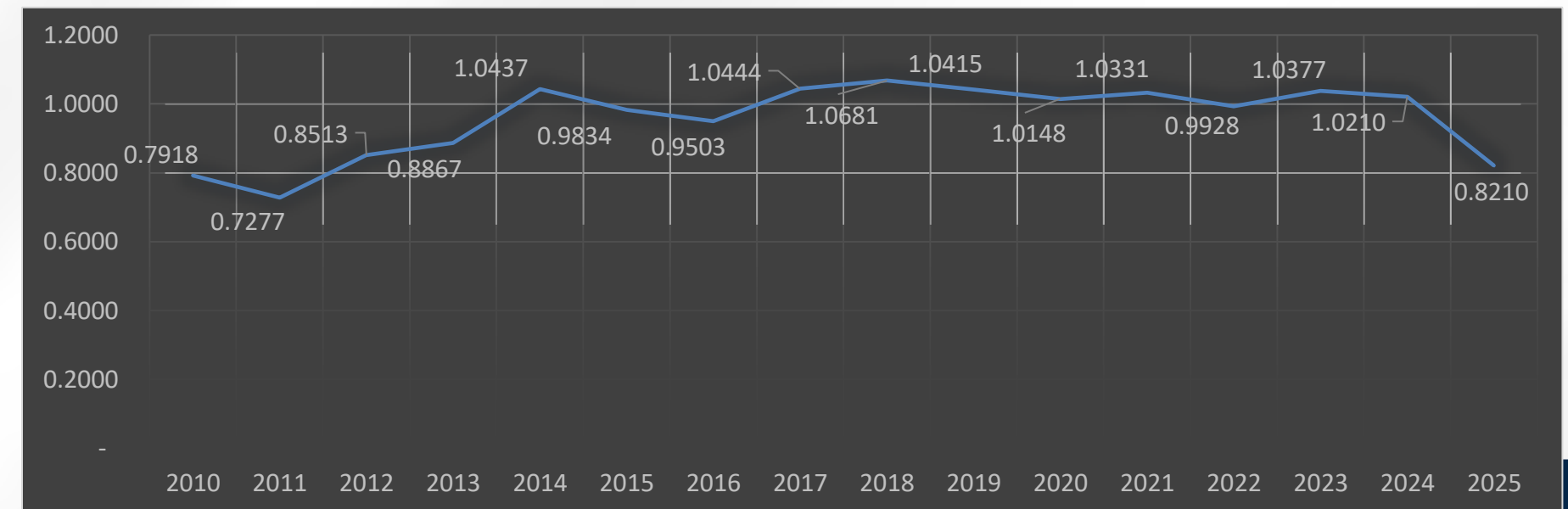
PERBANDINGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH



PERBANDINGAN IKSS. 3 KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH



PERBANDINGAN IKSS. 1 REVENUE MOBILIZATION



PERBANDINGAN IKSS. 4 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

2026

PENGUKURAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA





REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

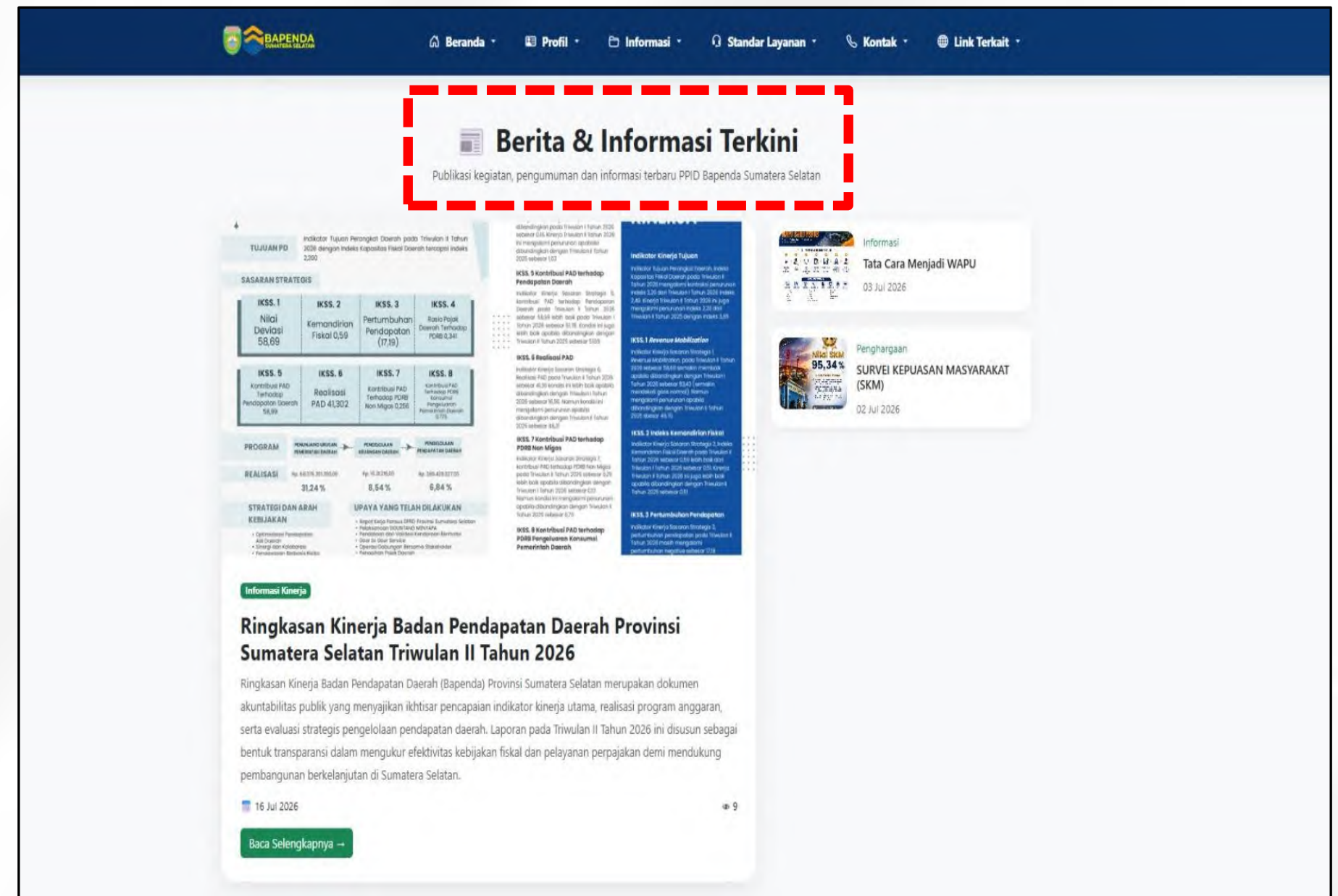




REKOMENDASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

CATATAN TEMUAN	URAIAN REKOMENDASI
Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP akan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja
TINDAKLANJUT	LANGKAH KONKRIT
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	1. Publikasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 pada website PPID Bapenda
	2. Rapat kerja penginputan E SAKIP
	3. Rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah
	4. Rapat kerja bersama BPKP terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah
	5. Pelaksanaan SIGUNTANG MENYAPA setiap hari Selasa
	6. Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor bersama 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota
	7. Penyusunan Analisis <i>Critical Success Factor</i> (CSF) peningkatan kinerja





<https://ppid-bapenda.sumselprov.go.id/>





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivali No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 14 Juli 2026

Nomor : 000.9-6-1 / 1859 / VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penginputan data pada aplikasi e-SAKIP Prov. Sumsel

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (data terlampir)
di – Tempat

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB RI Nomor B/359/AA.02/2026 Tanggal 14 Juli 2026 Hal Undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026. Dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 15 Juli 2026
Pukul : 08.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Acara : Penginputan data SAKIP Perangkat Daerah pada Aplikasi e-SAKIP Provinsi Sumatera Selatan

Data dukung yang diinput di aplikasi esakip.sumselprov.go.id akan dinilai oleh KEMENPAN RB RI pada Rabu 22 Juli 2026. Untuk itu diminta kepada Saudara Untuk Menugaskan Pejabat yang membidangi untuk hadir dengan membawa:

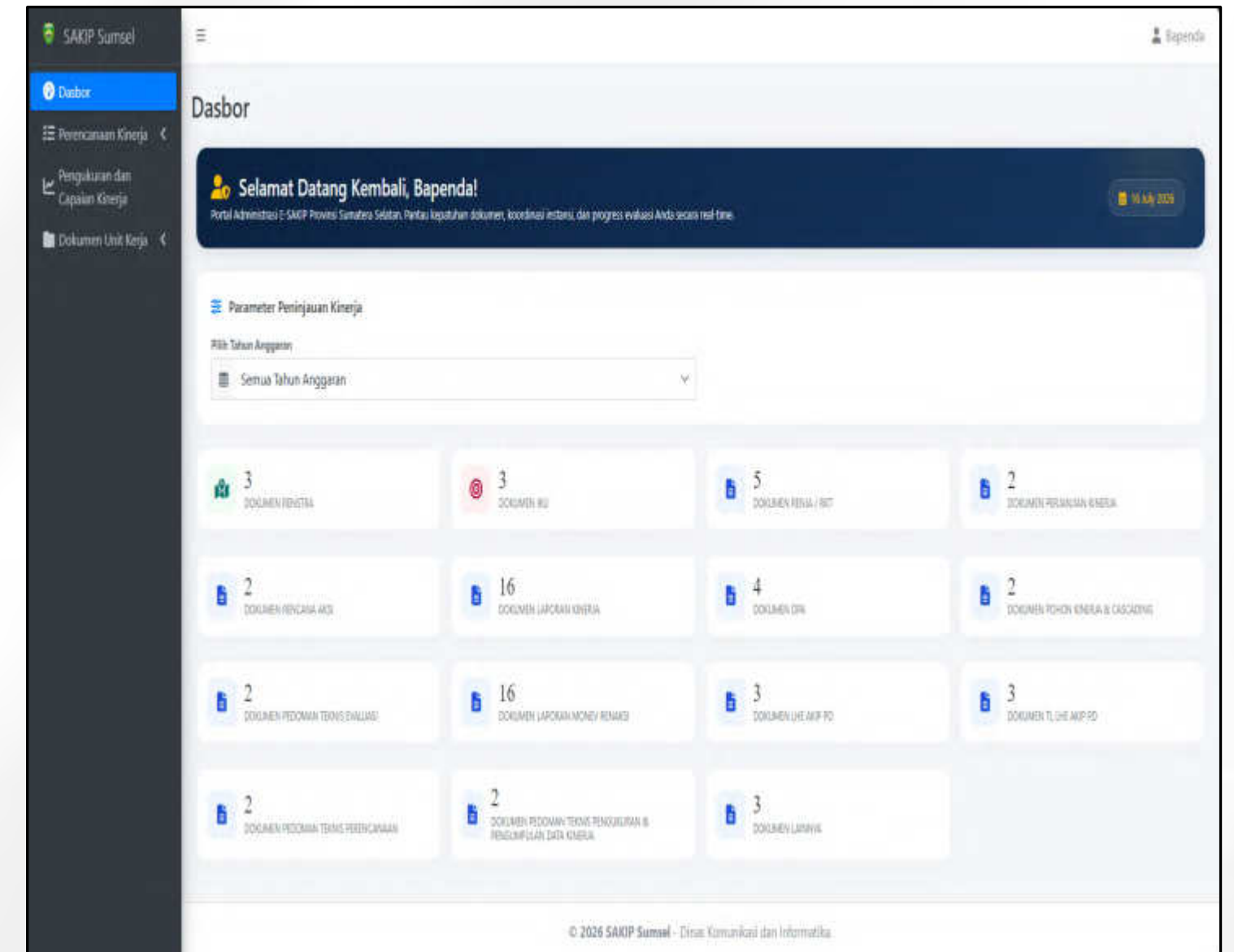
1. Laptop
2. Renstra
3. IKU
4. PK
5. RKT
6. Rencana Aksi
7. Realisasi Anggaran TW I dan TW II Tahun 2026

Untuk koordinas dapat menghubungi Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel (Sdri. Roa Sarimalia, SE., MM WhatsApp: 0821-1130-6892)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja samanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

H. Edward Candra





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivali Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

Palembang, 12 Juni 2026

Nomor : 000.1.2.2/2026 /DPRD-SS/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Pendampingan Rapat Kerja Pansus
Optimalisasi Pendapatan Daerah
DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
3. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Musi Banyuasin
4. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
5. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Muara Enim
6. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Musi Rawas Utara
7. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Musi Rawas
8. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Banyuasin
9. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kab. Ogan Komering Ulu
10. Kepala UPTB dan Kasi Penagihan Bapenda Kota Prabumulih
di-

TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap potensi pendapatan daerah, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Kerja Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan pada :

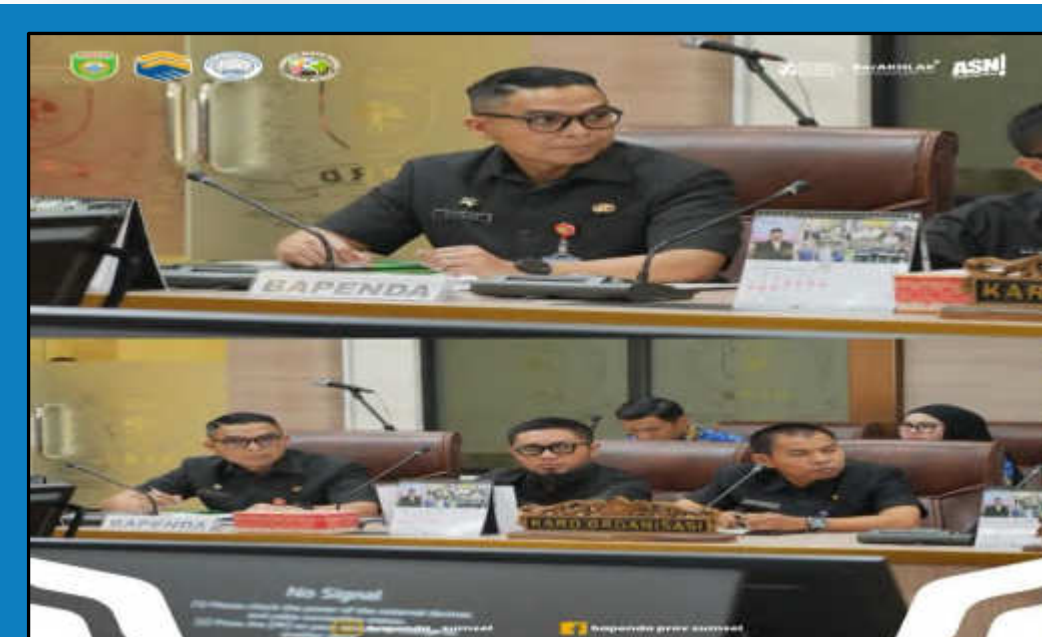
Hari/tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Pukul : 13.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel
Acara : Konsolidasi Pendapatan Daerah terhadap kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Migas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA



Catatan :
- Diharapkan hadir tanpa diwakilkan
- Membawa Permintaan Data Terlampir sebanyak 30 eksemplar





Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor penerimaan pajak daerah pada Triwulan II Tahun 2026

Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan strategi peningkatan PAD dari sisi audit BPKP

Memberikan gambaran kondisi keuangan daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sebagai upaya mitigasi risiko awal yang dilaksanakan oleh BPKP terkait dengan potensi tunggakan pajak daerah serta strategi untuk tidak terjadinya resiko dengan rencana tindak pengendalian yang preventif dan intensif



2026

RAPAT KERJA BERSAMA BPKP PERWAKILAN
TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan PCM 12, Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumatraprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 010A/KPTS/PENDA/2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SIGUNTANG
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah melaksanakan penciptaan inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi SIGUNTANG;

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor;

d. Sebagai basis data pajak kendaraan bermotor untuk perhitungan proyeksi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor;

e. Wajib pajak dan objek pajak kendaraan bermotor yang terdata melalui Aplikasi SIGUNTANG mendapatkan gantungan *Hang Tag*;

f. Sebagai terobosan inovasi dengan pendekatan kultur budaya masyarakat yang lebih humanis dan santun dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 010A/KPTS/PENDA/2026
TANGGAL : 13 April 2026

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SIGUNTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	TAMPILAN FITUR APLIKASI	KETERANGAN
1.		LOGIN dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara
2.		Tampilan dashboard awal Aplikasi SIGUNTANG

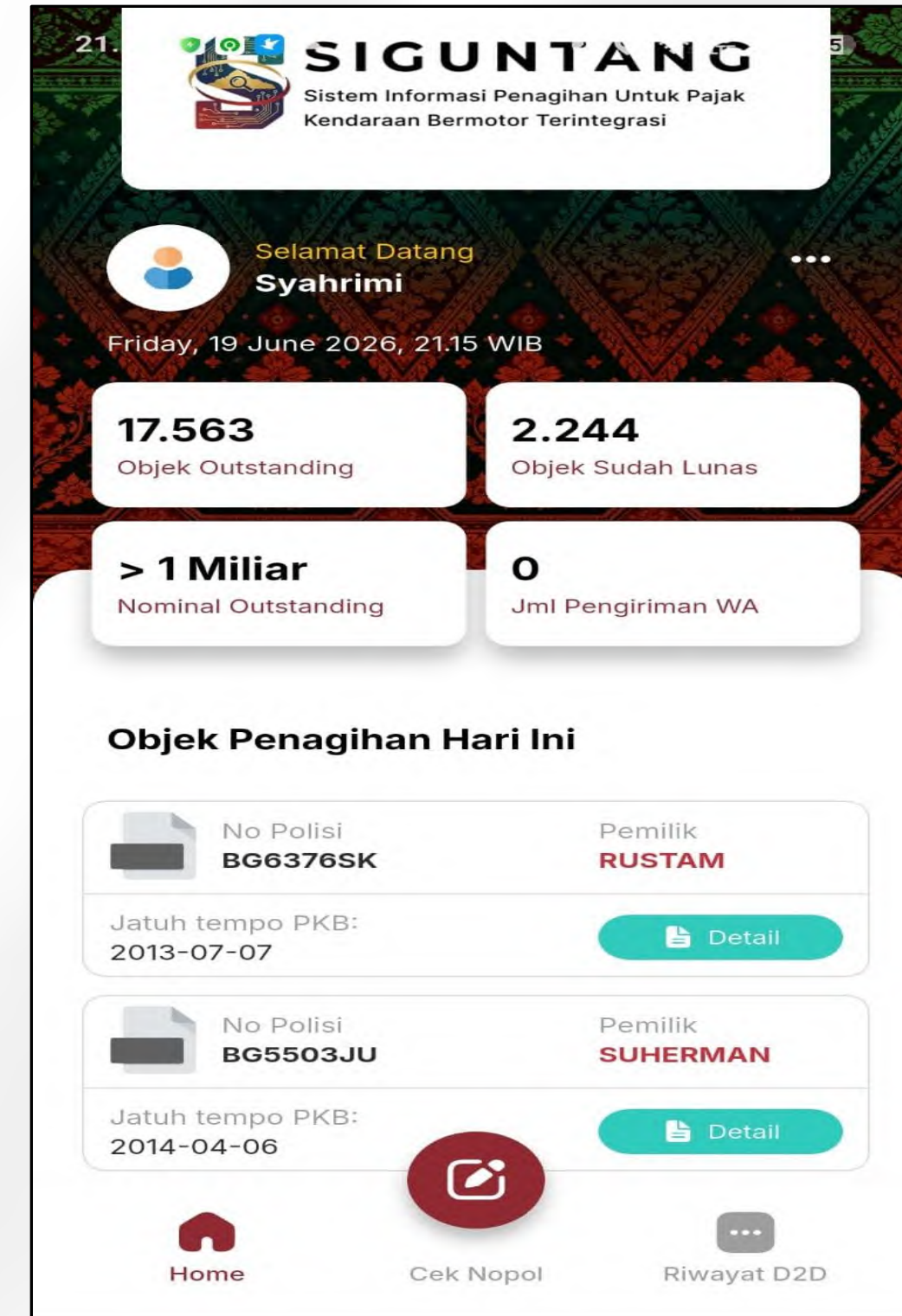
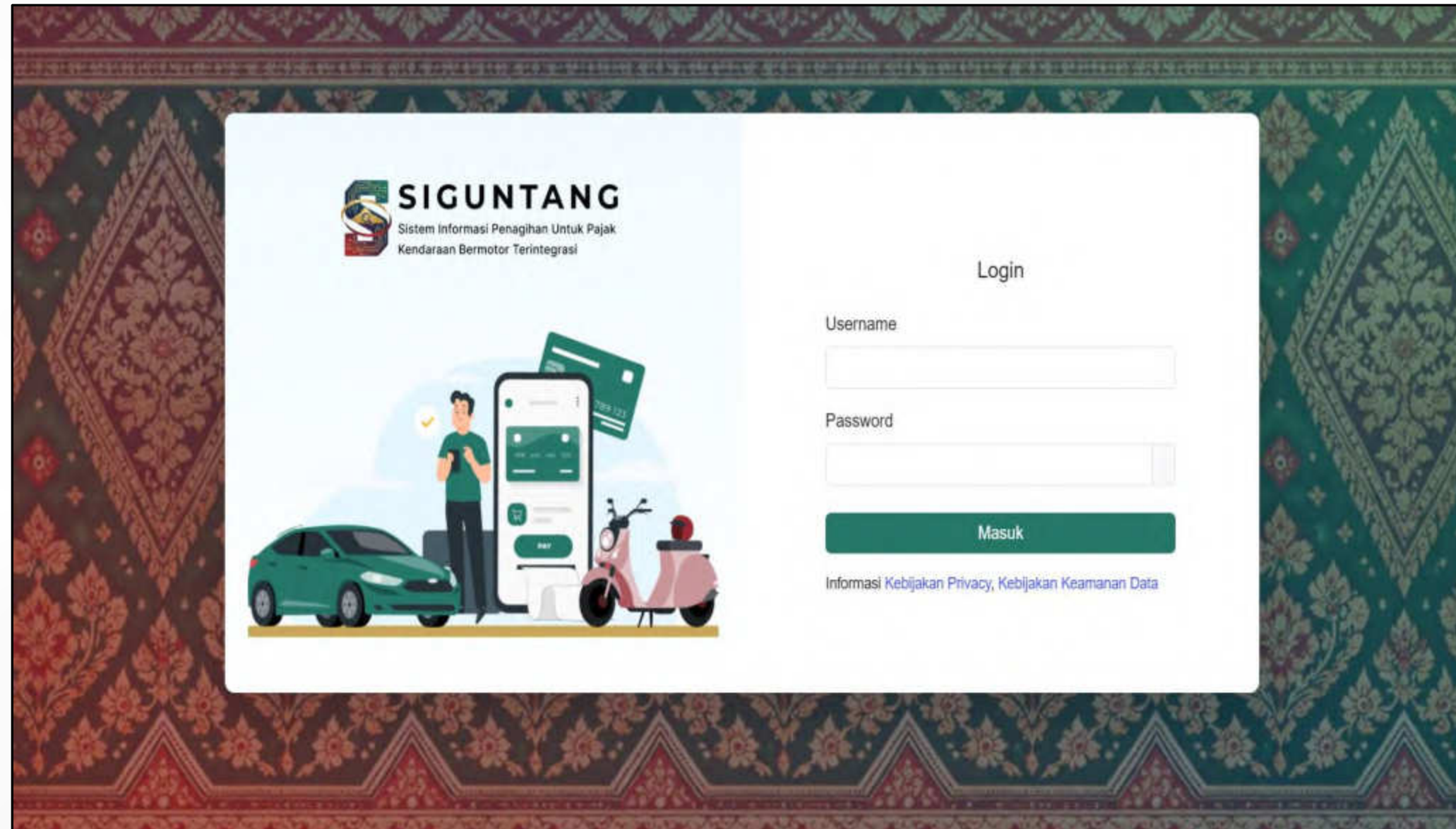
7.		Atau tindakan lain untuk input data kendaraan dengan melakukan klik potret langsung ke bagian plat nomor kendaraan
8.		Output hasil pendataan melalui Aplikasi SIGUNTANG

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001







Siguntang

Laporan Perorangan

Dashboard

Laporan

System

BAPENDA TK 1

Selamat Datang

SYAHRIMI

BAPENDA TK 1

Total Pendataan

375

Total Rupiah

Rp 146.443.575

Total Bayar

7

Persentase Bayar

1.87%

TOP 10 PENDATAAN

JULY 2026

HJ. NILAM ALMAYA WENITA

17

YOCE AFRIANSYAH

16

SYAHRIMI

12

4. YASMINE

11

5. ERWIN MARTHA

7

6. RINA SYARIFUDDIN

7

7. RM ARIEF BUDIMAN, SKM

7

8. MUHAMMAD ZAKARIA

7

9. ROMAI KURNIAWAN

6

10. ZARKONI

6

TOP 10 PEMBAYARAN

JULY 2026

RM ARIEF BUDIMAN, SKM

7

ARY WIBOWO

5

DADAN RAMDANI

2

4. M DZAKY ABDILLAH

2

5. K.M IBNU ATHOILLAH

1

6. HARIYADI

1

7. MUHAMMAD HABIBI SEPTIADI

1

8. ERWIN MARTHA

1

9. YUDA KUSUMA

1

10. SRI AGUSTI ANUGRAH

1

Laporan

Laporan Perorangan Siguntang

Buka Menu

Total Pendataan	375
Total Rupiah	Rp 146.443.575
TOP 10 PENDATAAN JULY 2026	
HJ. NILAM ALMAYA WENITA	17
YOCE AFRIANSYAH	16
SYAHRIMI	12
4. YASMINE	11
5. ERWIN MARTHA	7
6. RINA SYARIFUDDIN	7
7. RM ARIEF BUDIMAN, SKM	7
8. MUHAMMAD ZAKARIA	7
9. ROMAI KURNIAWAN	6
10. ZARKONI	6

Total Bayar	7
Persentase Bayar	1.87%
TOP 10 PEMBAYARAN JULY 2026	
RM ARIEF BUDIMAN, SKM	7
ARY WIBOWO	5
DADAN RAMDANI	2
4. M DZAKY ABDILLAH	2
5. K.M IBNU ATHOILLAH	1
6. HARIYADI	1
7. MUHAMMAD HABIBI SEPTIADI	1
8. ERWIN MARTHA	1
9. YUDA KUSUMA	1
10. SRI AGUSTI ANUGRAH	1





<https://indorepublik.com/sumsel-luncurkan-siguntang-revolusi-penagihan-pajak-kendaraan-berbasis-humanis/>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Palembang, [Indo Republik.com](https://indorepublik.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

”Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat,” tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasang “Hangtag” sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

REKOMENDASI 04 HASIL AKUNTABILITAS KINERJA

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

”Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan,” ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.

Baca Juga [Ir. Muhammad Affan Prapanca Resmi Jabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang](#)

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.

3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.)

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.



Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026



<https://sriwijaya-hariini.com/2026/04/07/inovasi-siguntang-strategi-gubernur-herman-deru-optimalkan-pad-lewat-sentuhan-digital/>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026

REKOMENDASI 04 HASIL
AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.
2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.
3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan. (Nopi)

Previous:

Parade Busana Wastra Sumsel Angkat Karya
Desainer Sumsel, Icha Key Gaungkan Potensi
Wastra Daerah

Next:

Hibah Lahan Disepakati, Gudang dan Dryer Segera
Dibangun di Sumsel





<https://www.radarri.com/palembang/bukan-sekadar-tagih-aplikasi-siguntang-sumsel-edukasi-wajib-pajak-lewat-hangtag-santun/>

Home > Palembang > Bukan Sekadar Tagih, Aplikasi Siguntang Sumsel Edukasi Wajib Pajak Lewat "Hangtag" Santun

Bukan Sekadar Tagih, Aplikasi Siguntang Sumsel Edukasi Wajib Pajak Lewat "Hangtag" Santun

Adi Wijaya / April 7, 2026 / No Comments



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Array

1 Shares 99 Views [Share on twitter](#) [Share on facebook](#) [Whatsapp](#) [Pin It](#) [LinkedIn](#)

Palembang, Radar RI.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat," tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasang "Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan," ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.
2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.
3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan. (Indah)

Previous Post

Kekuatan Restu dan Akar Budaya, Amunisi Dr (c)
Rety Septika SH.,M.Kn Menuju Kursi Bupati

Next Post

Libatkan APH, Lapas Banyuasin Perketat Pengawasan
Internal Lewat Tes Urin Menyeluruh

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://rajawalinews.online/siguntang-resmi-meluncur-herman-deru-dorong-penagihan-pajak-kendaraan-lebih-humanis-dan-berbasis-data/>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang – Rajawalinews.online

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor perpajakan daerah. Terbaru, Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG), Selasa (7/4/2026), di The Excelton Hotel Palembang.

Peluncuran aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menjawab tantangan modernisasi pelayanan publik yang semakin menuntut kecepatan, akurasi, dan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi.

“Kita tidak bisa memberikan reward maupun punishment secara tepat jika data yang kita miliki belum akurat. SIGUNTANG hadir untuk menjawab kebutuhan itu,” tegasnya.

Menariknya, Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan dalam sistem ini tidak semata-mata bersifat represif. Pemerintah, kata dia, mengedepankan sisi humanis dengan memberikan edukasi dan pengingat yang santun kepada wajib pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M., menjelaskan bahwa SIGUNTANG memiliki perbedaan mendasar dibandingkan aplikasi sebelumnya seperti Signal atau e-Dempo. Jika aplikasi terdahulu berfokus pada proses pembayaran, maka SIGUNTANG dirancang sebagai sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan.

“Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan, dan seluruh informasi mulai dari status pajak, jumlah tunggakan hingga lama keterlambatan akan langsung muncul secara real-time,” jelas Rizwan.

Dalam implementasinya, metode penagihan yang digunakan juga dirancang lebih persuasif. Petugas akan melakukan pengecekan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan, guna memastikan validitas data kendaraan.

Selain itu, kendaraan yang terdeteksi menunggak tidak langsung dikenakan sanksi, melainkan diberikan tanda pengingat berupa hangtag. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan kesan intimidatif.



2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026



<https://halosumsel.com/aplikasi-siguntang-diluncurkan-gubernur-herman-deru-targetkan-peningkatan-pad-dari-pajak-kendaraan/>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Palembang, Halosumsel– Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah, Selasa (7/4/2026), di Hotel Excelton Palembang.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026.

Herman Deru mengungkapkan, dari sekitar 4 juta unit kendaraan yang ada di Sumatera Selatan—yang mayoritas merupakan sepeda motor—tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, SIGUNTANG menjadi salah satu solusi berbasis digital yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penagihan pajak sekaligus memperkuat basis data kendaraan bermotor.

"Ini bukan sekadar untuk meraih penghargaan, tetapi bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat dan berdampak langsung pada pendapatan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem penagihan pajak telah berkembang dari metode razia di era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital yang lebih modern dan humanis. Dalam implementasinya, pendekatan yang tepat, termasuk "tekanan psikologis" yang positif, dinilai penting untuk mendorong kedisiplinan wajib pajak.

Gubernur juga menekankan bahwa modernisasi sistem harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan. Ia meminta seluruh petugas meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic.

REKOMENDASI 04 HASIL AKUNTABILITAS KINERJA

Selain itu, validitas data menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Herman Deru menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sektor andalan pendapatan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyebutkan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, antara lain Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year tahun 2024, serta Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera tahun 2025 dari Bank Indonesia.

Ia menambahkan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota.

SIGUNTANG sendiri merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas melakukan pemindaian pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung teridentifikasi untuk mengetahui status pajaknya. Kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo akan diberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk pemberitahuan.

Dalam masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, SIGUNTANG berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp673.487.723. Dari jumlah tersebut, 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183.820.930.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan, kepala BPKAD dan Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, serta pimpinan cabang Bank Sumsel Babel.



Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026



<https://voxentranews.com/2026/04/07/modernisasi-layanan-publik-pemprov-sumsel-resmi-operasikan-sistem-penagihan-real-time-siguntang/>



TIM BAPENDA SUMSEL

Spread the love



Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat," tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasang "Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

REKOMENDASI 04 HASIL AKUNTABILITAS KINERJA

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan," ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.
2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.
3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan.

(Rina)

voxentranews.com

Pusat suara berita dan fakta dunia

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





Modernisasi Layanan Publik, Pemprov Sumsel Resmi Operasikan Sistem Penagihan Real-Time Siguntang

Admin 2 Minggu Ago 2 Mins



KEPALA BAPENDA PROV. SUMSEL

Palembang, Wartasumatranews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat," tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasang "Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan," ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.
2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.
3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan. (Robi)



<https://wartasumatranews.com/wp/modernisiodernisasi-layanan-publik-pemprov-sumsel-resmi-operasikan-sistem-penagihan-real-time-siguntang/>

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://lensanews.id/sinergi-digital-di-bumi-sriwijaya-siguntang-hadir-sebagai-solusi-akurasi-data-pajak-kendaraan/>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PALEMBANG | lensanews.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat," tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasang "Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan," ujar Rizwan.



2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://beritasuararakyat.com/gubernur-herman-deru-launching-siguntang-dorong-digitalisasi-dan-peningkatan-pajak-kendaraan-di-sumsel/>

Beranda > Palembang >

Gubernur Herman Deru Launching SIGUNTANG, Dorong Digitalisasi dan Peningkatan Pajak Kendaraan di Sumsel

Berita-Suararakyat
Selasa, 7 April 2026



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang. Berita Suara Rakyat. Com

Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan berbasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, sistem penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang tepat, termasuk menghadirkan “tekanan psikologis” yang positif agar masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin baik dari aparat pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas untuk meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic sebagai bagian dari penguatan kapasitas.

Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, yang didominasi sepeda motor. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Untuk itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi penerimaan terbesar berada di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Ia juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Ia menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.



2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://lamanqu.com/2026/04/07/gubernur-sumsel-herman-deru-luncurkan-siguntang-inovasi-digital-penagihan-pajak-kendaraan-di-sumsel/>

Home > News > Sumsel

Gubernur Sumsel Herman Deru Luncurkan SIGUNTANG, Inovasi Digital Penagihan Pajak Kendaraan di Sumsel

Reporter YN — 7 April 2026



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026



Bagikan ke Whatsapp



Palembang. Lamanqu. Com

Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi. [Berita Sumsel](#)

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan berbasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, sistem penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Ia juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Ia menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi daerah, Pemprov Sumsel melalui Bapenda menghadirkan inovasi aplikasi SIGUNTANG sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak sekaligus memperkuat basis data kendaraan.

Aplikasi SIGUNTANG merupakan sistem berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas melakukan pemindaian (scan) pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung teridentifikasi untuk mengetahui status pajaknya. Jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo, petugas akan memberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak.

LamanQu





<https://sibernas1.com/gubernur-herman-deru-launching-siguntang-dorong-digitalisasi-dan-peningkatan-pajak-kendaraan-di-sumsel/>

SUMSEL MAJU

Gubernur Herman Deru Launching SIGUNTANG, Dorong Digitalisasi dan Peningkatan Pajak Kendaraan di Sumsel

jemy saputra · 07/04/2026

0 215 2 minutes read

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Messenger



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Sibernas1.com Palembang.— Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan berbasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, sistem penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang tepat, termasuk menghadirkan “tekanan psikologis” yang positif agar masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin baik dari aparat pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas untuk meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic sebagai bagian dari penguatan kapasitas.

Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, yang didominasi sepeda motor. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Untuk itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi penerimaan terbesar berada di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Ia juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BACA JUGA : [Pulang Kampung Wagub Cik Ujang Gelar Halal Bihalal Dengan Warga Lahat](#)

Ia menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi daerah, Pemprov Sumsel melalui Bapenda menghadirkan inovasi aplikasi SIGUNTANG sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak sekaligus memperkuat basis data kendaraan.

Aplikasi SIGUNTANG merupakan sistem berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas melakukan pemindaian (scan) pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung teridentifikasi untuk mengetahui status pajaknya. Jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo, petugas akan memberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak.

SIBERNAS.COM
News, Sport, Economy, Politics & Lifestyle

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://www.harian62.info/2026/04/gubernur-herman-deru-launching.html>

Gubernur Herman Deru Launching SIGUNTANG, Dorong Digitalisasi dan Peningkatan Pajak Kendaraan di Sumsel

FIKI PERISTIWA 24 APRIL 07, 2026 0 KOMENTAR



Palembang, harian62.info -

Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan berbasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, sistem penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang tepat, termasuk menghadirkan "tekanan psikologis" yang positif agar masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin baik dari aparat pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas untuk meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic sebagai bagian dari penguatan kapasitas.

Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, yang didominasi sepeda motor. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Untuk itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi penerimaan terbesar berada di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. Ia juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://suarapublik.id/digitalisasi-siguntang-didorong-tingkatkan-kepatuhan-pajak-kendaraan-di-sumsel/>

Digitalisasi SIGUNTANG Didorong Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan di Sumsel

Redaksi - Redaksi
Selasa, 7 April 2026



Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, didampingi kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan dan lainnya secara resmi meluncurkan aplikasi SIGUNTANG

PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui peluncuran aplikasi Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi meluncurkan aplikasi SIGUNTANG dalam kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Palembang, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa kehadiran aplikasi SIGUNTANG merupakan bagian dari transformasi pelayanan pajak yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

“Kita tidak boleh berhenti berinovasi. Dulu penagihan pajak dilakukan dengan razia, kemudian melalui surat, sekarang kita masuk era digital. Ini adalah bentuk pelayanan yang lebih modern dan humanis,” ujarnya.

Ia menekankan, tujuan utama pengembangan sistem digital tersebut bukan sekadar untuk meraih penghargaan, melainkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Saya ingin tegaskan, aplikasi ini bukan untuk mengejar penghargaan, tetapi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah,” kata Herman Deru.

“Aplikasi ini berbasis web dan mobile. Petugas cukup memindai pelat nomor kendaraan, maka data kendaraan dan status pajaknya akan langsung muncul,” jelas Rizwan.

Ia menambahkan, jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo pembayaran pajak, petugas akan memberikan penandaan sebagai bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak.

“Langkah ini dilakukan sebagai pengingat kepada masyarakat agar segera memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan,” ujarnya.

Rizwan juga mengungkapkan bahwa pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG telah menunjukkan hasil awal yang cukup positif.

“Selama masa uji coba, kami berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp673 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 430 unit kendaraan atau sekitar 43,47 persen sudah melakukan pembayaran,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis, penerapan sistem digital melalui aplikasi SIGUNTANG akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat basis data kendaraan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





<https://palembang.tribunnews.com/metro/1314752/optimalikan-pendapatan-daerah-pemprov-sumsel-luncurkan-aplikasi-siguntang-untuk-penagihan-pajak>



GOVERNOR SUMATERA SELATAN

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan sistem informasi penagihan pajak kendaraan berbasis digital melalui aplikasi Siguntang. Peluncuran inovasi layanan publik ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini diambil sebagai strategi penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui pendekatan yang lebih modern dan akurat.

“Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.

Pendekatan Humanis dalam Penagihan

Gubernur menekankan bahwa kehadiran Siguntang mengedepankan sisi humanis.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada penagihan secara kaku, tetapi juga memberikan edukasi serta pengingat yang santun kepada masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, menjelaskan perbedaan mendasar antara Siguntang dengan aplikasi pendahulunya.

“Jika aplikasi seperti Signal atau e-Dempo difokuskan pada proses pembayaran, maka Siguntang hadir sebagai sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas,” jelas Rizwan.

Fitur Utama dan Mekanisme Kerja

Aplikasi Siguntang memungkinkan petugas melakukan pengecekan data secara real-time di lapangan.

Cukup dengan memasukkan nomor kendaraan, informasi status pajak, nominal tunggakan, hingga lama keterlambatan akan langsung ditampilkan.

Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan akan menerapkan metode:

Pengecekan di Ruang Publik: Melakukan validasi data kendaraan di perkantoran maupun pusat perbelanjaan.

SRIPOKU.com

2026

Launching SIGUNTANG
Excelton Palembang Hotel, 07 April 2026





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan POM IX, Lorok Pakjo, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan 30137
Website : <https://bapenda.sumseprov.go.id>, Email : bapenda.sumseprov@gmail.com

Palembang, 14 April 2026

Nomor : 973/II/000512/Penda/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Siguntang Menyapa.

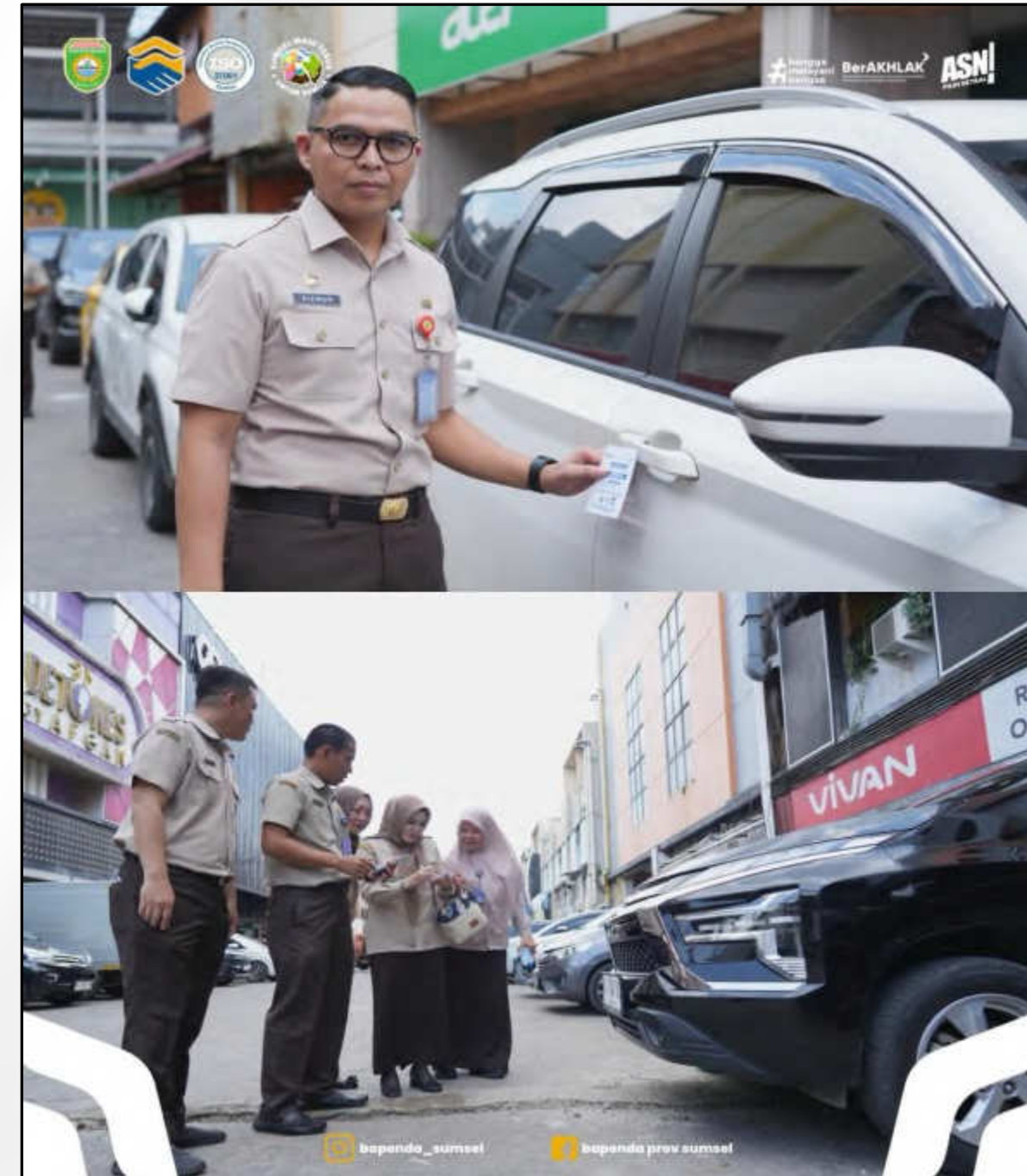
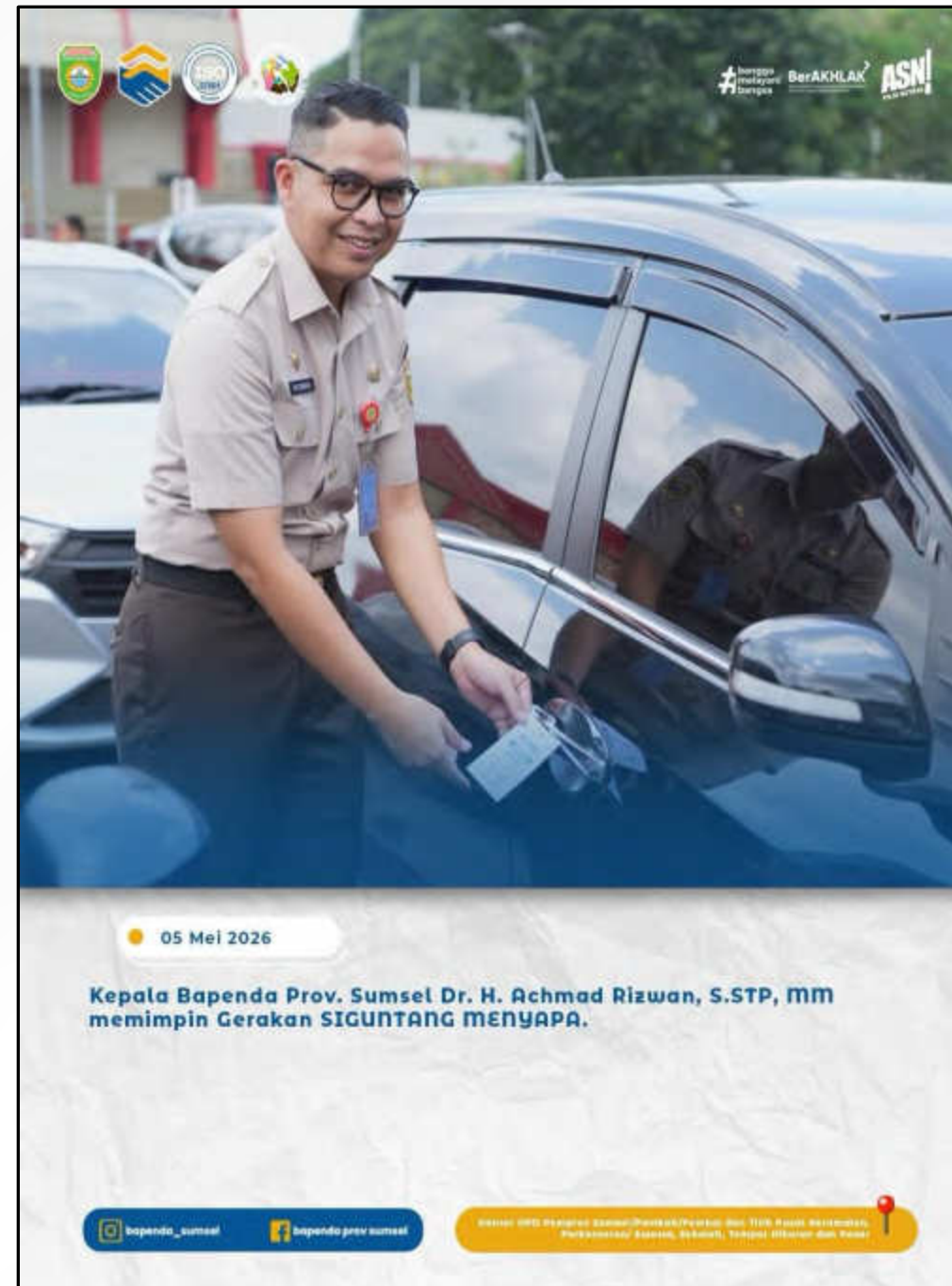
Yth. 1. Sekretaris Bapenda Provinsi Sumsel
2. Kepala Bidang Bapenda Provinsi Sumsel
3. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumsel
4. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota Se-Sumsel
di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Launching Aplikasi Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. Herman Deru pada tanggal 7 April 2026, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pendataan/ Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi melalui aplikasi SIGUNTANG dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.
- Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut pada Poin 1 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - Door to door mendatangi Wajib Pajak sesuai Database Tunggakan yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Jadwal UPTB PPD masing-masing.
 - Mendatangi Parkiran/ Titik kumpul kendaraan dengan menggantungkan HangTag pada Kendaraan yang telah didata dan lewat jatuh tempo.
- Khusus untuk kegiatan mendatangi Parkiran/ Titik kumpul kendaraan dengan menggantungkan HangTag pada Kendaraan yang telah didata dan lewat jatuh tempo dilaksanakan secara berkala setiap hari Selasa dengan Nama Kegiatan **Siguntang Menyapa** terhitung mulai tanggal 28 April 2026 dan dapat mengikutsertakan Personil Satuan Lalu Lintas dan Personil Jasa Raharja.
- Target Kegiatan Siguntang Menyapa dengan menggantungkan HangTag dengan rincian :
 - Untuk Sekretariat, Bidang Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB Puslia masing-masing ditargetkan sebanyak 100 Data Kendaraan (100 HangTag per minggu).
 - Untuk UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan ditargetkan sebanyak 50 Data Kendaraan (50 HangTag per minggu).
- Untuk laporan kegiatan Siguntang Menyapa secara berkala disampaikan kepada Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan C.q. Sekretaris Badan dan berkoordinasi dengan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sdr. Syahrini, S.SiT, M.Si

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP.,M.M
PEMBINA UTAMA MADYA IV/d
NIP. 198109232000121001



2026

PELAKSANAAN SIGUNTANG MENYAPA
Setiap Hari SELASA





Bapenda Sumsel gencarkan Siguntang Menyapa tingkatkan kepatuhan pajak

Rabu, 6 Mei 2026 22:27 WIB



Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan. ANTARA/HO/Bapenda Sumsel



PELAKSANAAN SIGUNTANG MENYAPA
Setiap Hari SELASA

2026





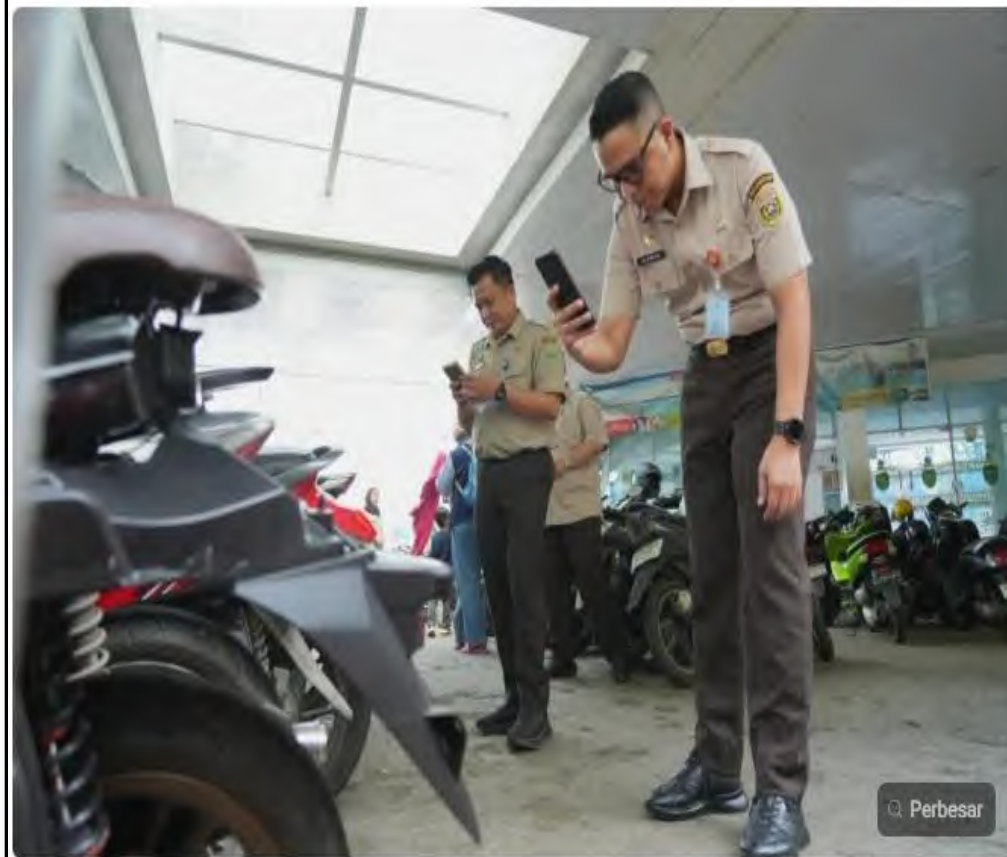
NEWS

Dari 5.834 Tunggakan Pajak, 900 Kendaraan di Sumsel Lunas Berkat SIGUNTANG MENYAPA



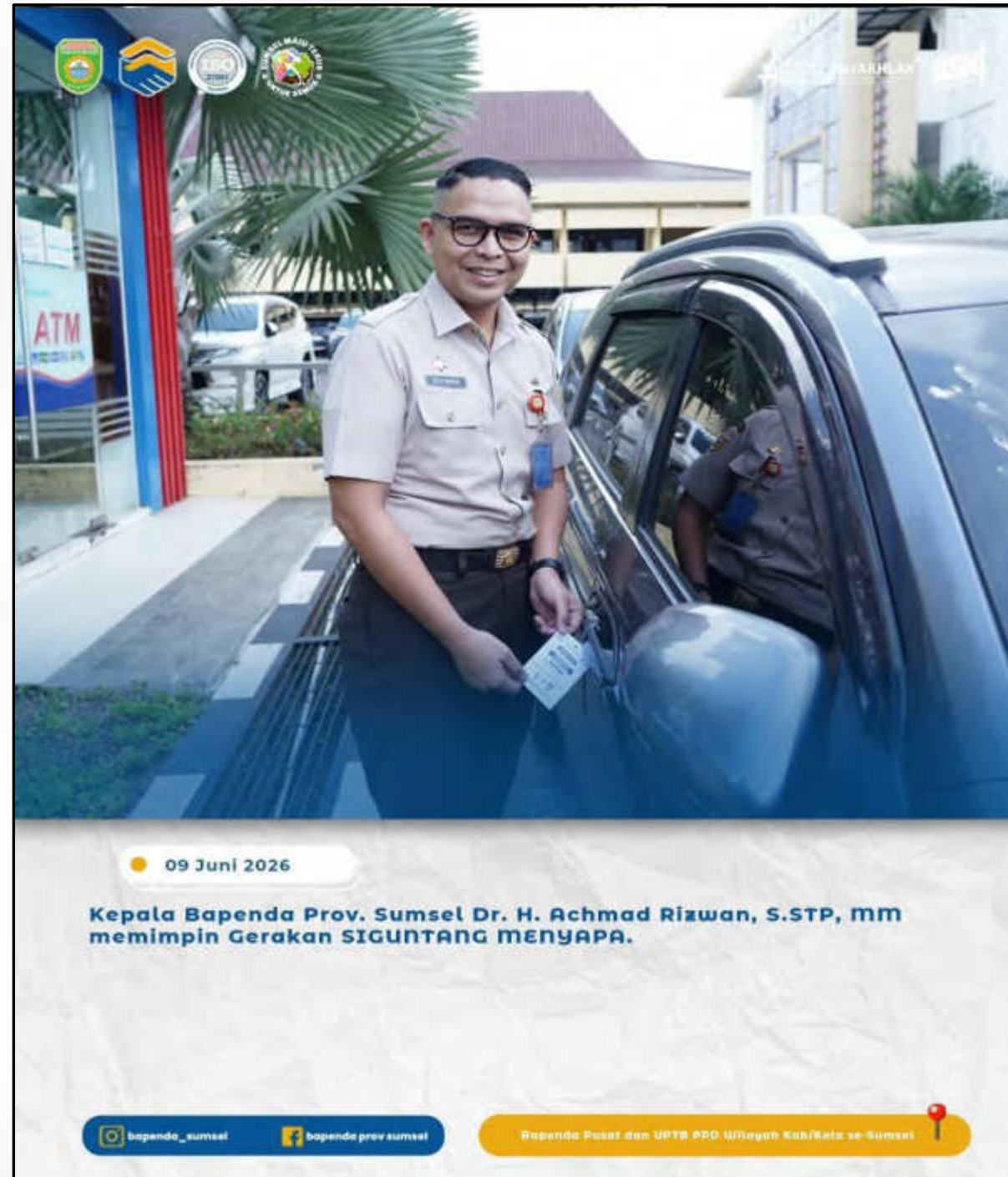
Toriq Abdullah

5 Mei 2026 • 21:22 WIB



Perbesar

Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan saat mengecek pajak kendaraan yang sedang parkir. Foto : Bapenda Sumsel



bapenda_sumsel

bapenda prov sumsel

Bapenda Pusat dan UPTB PRO Wilayah Kabi/Kota se-Sumsel

Bapenda Sumsel Gencarkan Program Siguntang Menyapa, Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan

Selasa 05-05-2026,18:37 WIB

Reporter: Muhamad Aidil | Editor: Muhadi Syukur

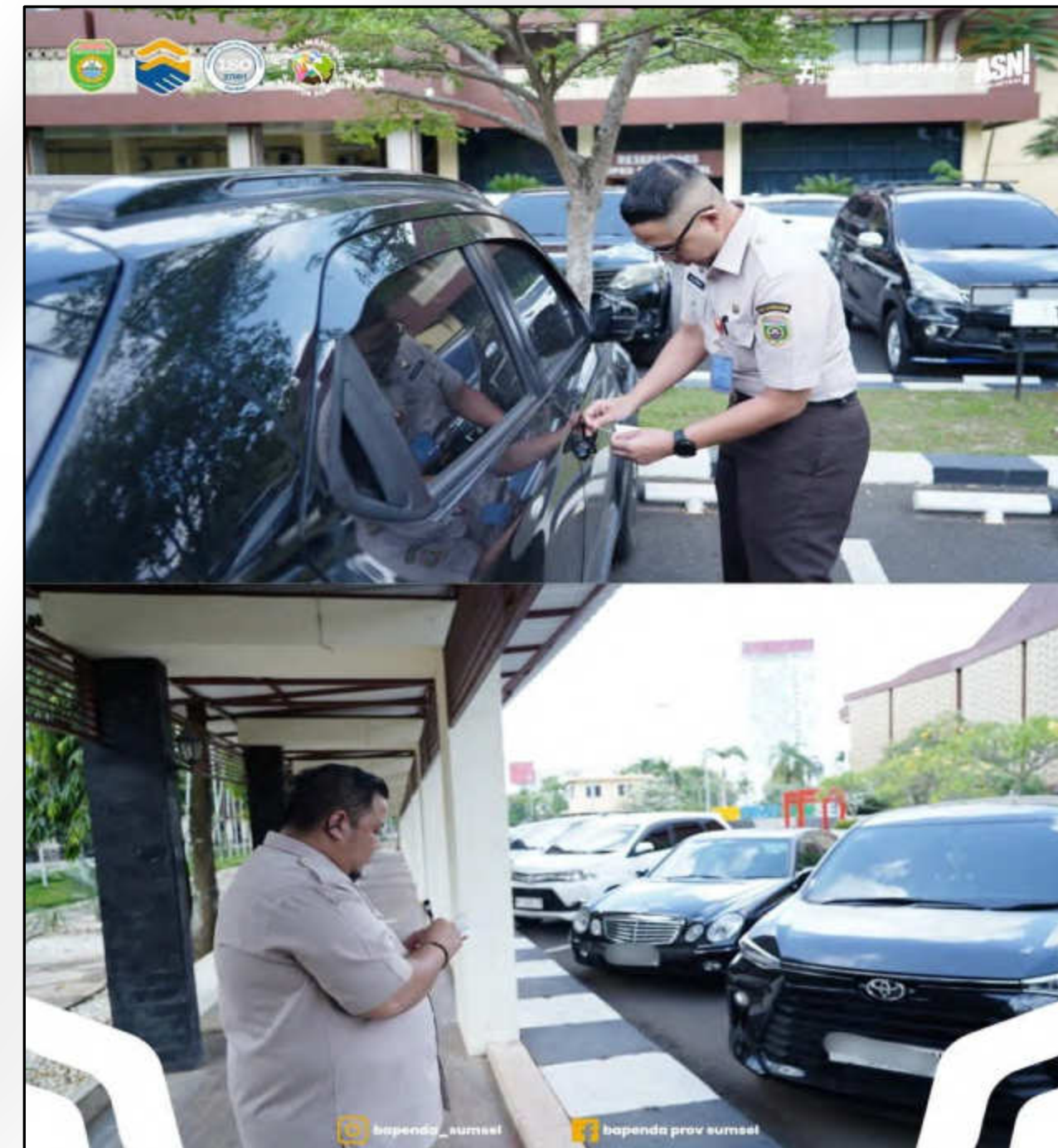


Program Siguntang Menyapa yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah.—Foto : M. Aidil - PALTV

2026

PELAKSANAAN SIGUNTANG MENYAPA
Setiap Hari SELASA

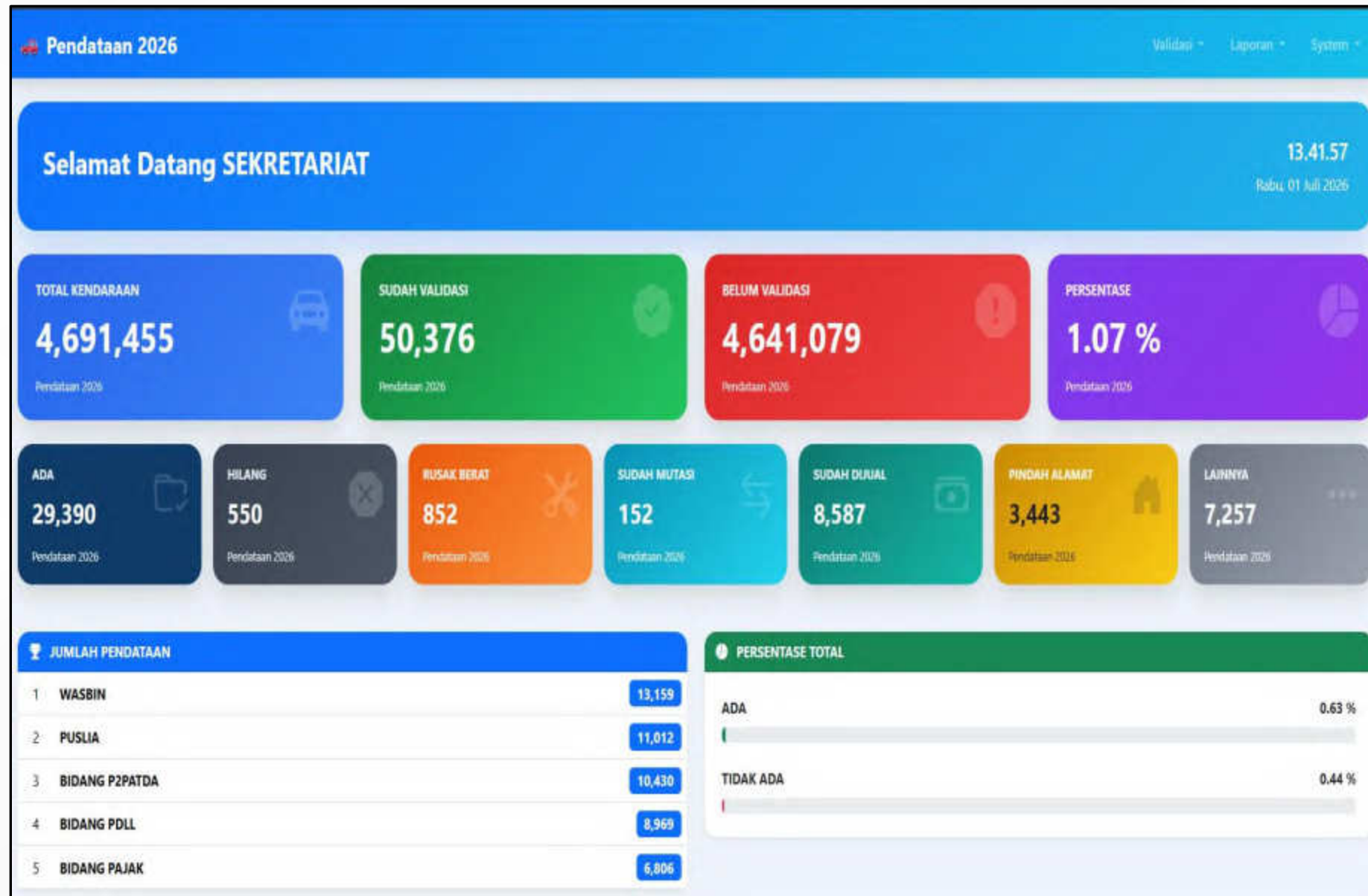




2026

PELAKSANAAN SIGUNTANG MENYAPA
Setiap Hari SELASA





BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REKAP VALIDASI KENDARAAN			
Kondisi Data : 01 July 2026 13:44:23 WIB Dicetak Oleh : SEKRETARIAT Tanggal Cetak : 01-07-2026 13:44:23 WIB			
TOTAL KENDARAAN	SUDAH VALIDASI	BELUM VALIDASI	PERSENTASE
4,691,455	50,394	4,641,061	1.07 %
RINGKASAN HASIL VALIDASI			
No	Keterangan	Jumlah	
1	ADA	29,403	
2	HILANG	550	
3	RUSAK BERAT	852	
4	SUDAH MUTASI	152	
5	SUDAH DIJUAL	8,589	
6	PINDAH ALAMAT	3,444	
7	LAINNYA	7,259	
TOTAL SUDAH VALIDASI			50,394
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Aplikasi Pendataan 2026 Dicetak : 01-07-2026 13:44:23 WIB			





<https://palembang.tribunnews.com/metro/1314872/bapenda-sumsel-validasi-data-kendaraan-bermotor-optimalkan-pajak-daerah-hingga-mei-2026>

Bapenda Sumsel Validasi Data Kendaraan Bermotor, Optimalkan Pajak Daerah hingga Mei 2026

Tayang: Kamis, 9 April 2026 08:48 WIB

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Odi Aria



lihat foto

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan validasi data kendaraan bermotor di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebagai langkah strategis meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kepala **Bapenda Sumsel**, **Achmad Rizwan** menegaskan, **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembangunan.

“Pajak kendaraan bermotor menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan bisa dioptimalkan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Rizwan menjelaskan, kegiatan validasi kendaraan bermotor telah dimulai sejak 1 April dan akan berlangsung hingga 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan aktif di Sumsel dapat terdata secara akurat dan terbaru.

“Validasi kendaraan dilakukan agar kita mengetahui secara pasti berapa banyak kendaraan yang masih aktif di Sumsel,” jelasnya.

Banyak Kendala Data di Lapangan
Menurut Rizwan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan data kendaraan bermotor, di antaranya:

Data yang belum diperbarui
Perubahan kepemilikan yang belum tercatat
Kendaraan yang belum teridentifikasi di lapangan
Melalui validasi ini, pemerintah berupaya melakukan pemutakhiran data secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, termasuk desa dan kelurahan.

Didukung Program SIGUNTANG
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG di Palembang.

Dalam masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG mencatat:

989 unit kendaraan terdata
Potensi PKB mencapai Rp673.487.723
430 kendaraan (43,47 persen) sudah membayar
Realisasi penerimaan Rp183.820.930
Desa Diminta Aktif Validasi
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel, Sutoko, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

SRIPOKU.com





<https://sumsel.antaranews.com/berita/815704/bapenda-sumsel-libatkan-pemerintah-desa-untuk-optimalkan-pajak-kendaraan>

Bapenda Sumsel libatkan pemerintah desa untuk optimalkan pajak kendaraan

Kamis, 9 April 2026 14:49 WIB



Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan Achmad Rizwan. ANTARA/HO-Bapenda Sumsel

Palembang, Sumsel (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses validasi data kendaraan bermotor guna meningkatkan akurasi data dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan di Palembang, Sumsel, Kamis, mengatakan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan.

"Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Karena itu, validasi dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan validasi data kendaraan bermotor dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai 1 April hingga 31 Mei 2026.

Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan data, seperti data yang belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum tercatat, hingga kendaraan yang belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Maka dari itu, keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan diharapkan proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif karena aparaturnya di tingkat tersebut memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat.

Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG, yang menekankan pentingnya basis data yang kuat dan terintegrasi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor.

Pada masa uji coba aplikasi SIGUNTANG sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, tercatat sebanyak 989 unit kendaraan dengan potensi PKB sebesar Rp673,48 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan mencapai Rp183,82 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel Sutoko menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan validasi data tersebut.

Pemerintah desa sangat penting dalam memastikan akurasi data kendaraan di lapangan.

"Pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami mendorong seluruh desa aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor," katanya.

Validasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

ANTARA SUMSEL





https://sumatra.bisnis.com/read/20260409/533/1965529/bapenda-sumsel-validasi-data-kendaraan-gali-potensi-pendapatan-dari-pajak-kendaraan-bermotor#goog_rewarded

Bapenda Sumsel Validasi Data Kendaraan, Gali Potensi Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor

Bapenda Sumsel validasi data kendaraan 1 April-31 Mei 2026 untuk optimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, melibatkan semua tingkat pemerintahan.



Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Kamis, 9 April 2026 120:25

Share



Kredit kendaraan bermotor atau kredit mobil. / dok. Freepik-xb100

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Selatan mulai melakukan validasi data kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program validasi ini dilaksanakan serentak mulai 1 April hingga 31 Mei 2026 di seluruh wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa dan kelurahan.

"Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Validasi ini dilakukan di Sumsel mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten dan kota," ujarnya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan data kendaraan bermotor, mulai dari data yang belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum tercatat, hingga kendaraan yang belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Dengan demikian, validasi data dilakukan sebagai upaya pemutakhiran basis data kendaraan secara terpadu agar potensi pajak yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan.

"Melalui kegiatan validasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan pemutakhiran data secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa dan kelurahan," imbuhnya.

Rizwan menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumsel saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG. Gubernur menekankan bahwa penerimaan PKB masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga pengelolaan pajak harus didukung basis data yang kuat dan terintegrasi.

Pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp673 juta.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47% telah melakukan pembayaran, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183 juta," jelasnya.

Capaian ini dinilai mencerminkan masih besarnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan yang dapat terus digali melalui validasi data secara menyeluruh.

SUMATRA

HOME KABAR SUMATRA BISNIS SUMATRA





<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8435584/pemprov-sumsel-perkuat-validasi-data-kendaraan-target-pkb-naik>



Palembang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan akan melakukan validasi data kendaraan bermotor. Upaya itu untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk akurasi data di lapangan.

"Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan. Validasi itu sudah mulai dilakukan dan akan terus berjalan hingga 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel," ujar Rizwan, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya peningkatan pajak daerah akan dilakukan, menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD).

Rizwan menjelaskan validasi kendaraan itu sejalan dengan arahan Gubernur Herman Deru saat launching aplikasi Siguntang 7 April 2026. Bahwa pengelolaan pajak yang optimal harus didukung basis data kuat dan terintegrasi.

Pada masa uji coba aplikasi Siguntang (1 Januari-17 Maret 2026), berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi PKB Rp 673.487.723. Dari jumlah itu, 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan Rp 183.820.930.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel Sutoko menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan validasi data kendaraan bermotor tersebut. Dia menilai peran pemerintah desa sangat penting memastikan akurasi data di lapangan.

"Pemerintah desa/kelurahan memiliki pemahaman terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor," ungkap Rizwan.

detiksumbagsel





<https://focuskini.id/bapenda-sumsel-targetkan-pemutakhiran-data-kendaraan-di-17-kabupaten-kota/>



Palembang,Focuskini

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Aula Sriwijaya pada Rabu (8/4/2026) guna melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor secara terpadu di seluruh kabupaten/kota demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang melibatkan Dinas PMD dan pemerintah kabupaten/kota ini dijadwalkan berlangsung mulai April hingga 31 Mei 2026 sebagai langkah strategis memperkuat basis data pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menyampaikan jika akurasi data merupakan aspek krusial karena sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pilar utama pembiayaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.

“Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan,” ujar Rizwan, Kamis (9/4/2026).

Validasi ini juga merupakan tindak lanjut dari pengoperasian aplikasi SIGUNTANG yang mewajibkan adanya integrasi data yang kuat.

Berdasarkan catatan masa uji coba sejak awal tahun hingga Maret 2026, aplikasi tersebut telah mendeteksi potensi pajak sebesar Rp673 juta, dengan realisasi pembayaran mencapai 43,47 persen dari total kendaraan yang terdata.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PMD Sumsel, Sutoko, memberikan dukungan penuh dengan menginstruksikan perangkat desa dan kelurahan untuk menjadi ujung tombak verifikasi di lapangan.

Keterlibatan aparaturnya tingkat bawah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kendaraan yang belum teridentifikasi serta perubahan status kepemilikan agar transparansi pajak semakin meningkat.

“Pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor,” pungkasnya. (Tia)





LAPORAN ANALISIS CSF META INDIKATOR KINERJA FISKAL DAERAH

2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) META INDIKATOR KINERJA FISKAL DAERAH

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas modifikasi dari penerapan *fiscal federalism* di beberapa negara bagian di Benua Eropa yang berlandaskan pada teori tradisional (*first-generation theories*) dan *new perspective theories* (*second-generation theories*). Peran dan fungsi pengelolaan keuangan yang diserahkan kepada pemerintahan pada lini bawah yang digunakan untuk ruang pelayanan publik. Dalam beberapa penelitian di beberapa negara bagian di Eropa, bahwa pengambilan kebijakan terdesentralisasi menurut tingkatan terbawah dalam sistem pemerintahan dan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terbawah untuk memastikan bahwa rakyat atau masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif ruang pelayanan publik (Olaide et al., 2022).

Hubungan sektor pengelolaan keuangan yang dikembalikan kepada publik, pemerintahan daerah seharusnya mempunyai pengetahuan lebih baik tentang karakteristik wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat dengan rentang kendali yang jauh (Bushashe & Bayiley, 2024). Dengan demikian, harapannya adalah pemerintahan daerah bisa mengambil keputusan terbaik atas permasalahan di daerah terkait penyediaan produk barang serta jasa dengan lebih efektif dan efisien, yang lebih dikenal sebagai pengetahuan efisiensi alokasi dalam pendanaan serta membelanjakan dengan program yang tepat sasaran (Hidayat & Yulianita, 2025).

Pengembangan teori generasi tahap kedua, disempurnakan dengan berfokus berfokus pada pentingnya pembagian menurut tingkatan kewenangan sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat dalam mengatur serta mengelola pendapatan dan belanja (*revenue and expenditure assignment*) diantara tingkatan level pemerintahan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa peran dan posisi pemerintahan daerah dapat dipengaruhi dengan menerapkan desentralisasi fiskal daerah (Olaide et al., 2025). Peran pemerintah pusat telah terbagi dalam mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan di tingkat daerah, maka pemerintahan daerah mengambil peran tersebut untuk mengelola kewenangan yang lebih besar namun tetap berlandaskan pada prinsip keseimbangan antar wilayah dalam mengembangkan perekonomian sumber daya daerah. Sebagai upaya yang terus diselenggarakan dengan konsolidasi fiskal, kepentingan untuk menciptakan pemerintah daerah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan perekonomian di daerah, teori generasi tahap kedua ini juga mempunyai pondasi pada dua struktur yaitu adanya interaksi yang tak terbatas antar tingkat pemerintahan serta interaksi horizontal untuk menjaga kesenjangan antar wilayah pemerintahan daerah.

Pendekatan kebijakan pengelolaan desentralisasi fiskal dari penerimaan daerah yang sah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor

Uji akar unit digunakan untuk mengidentifikasi tren stokastik dalam data. Untuk mempelajari hubungan antar variabel, persamaan umum berikut diusulkan:

$$IKFD_t = \beta_0 + \beta_1 IKSS1_t + \beta_2 IKSS2_t + \beta_3 IKSS3_t + \beta_4 IKSS4_t + \beta_5 IKSS5_t + \beta_6 IKSS6_t + \beta_7 IKSS7_t + \beta_8 IKSS8_t + e_t \quad (1)$$

Di mana: β_0 adalah konstanta dan $\beta_1 - \beta_8$ adalah koefisien variabel eksogen, dan ε adalah faktor kesalahan. Dari persamaan (1) di atas, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Pesaran et al., (2001). Jika deret tersebut stasioner pada tingkat pertama dan tingkat perbedaan atau keduanya, model ini dapat digunakan. Jika terdapat hubungan jangka panjang antara variabel yang dipertimbangkan, model ARDL jangka panjang dan jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$\Delta IKFD_t = \alpha_0 + \alpha_1 IKSS1_{t-1} + \alpha_2 IKSS2_t + \alpha_3 IKSS3_t + \alpha_4 IKSS4_t + \alpha_5 IKSS5_t + \alpha_6 IKSS6_t + \alpha_7 IKSS7_t + \alpha_8 IKSS8_t + \sum_{i=1}^n \beta_1 \Delta IKFD_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_2 \Delta IKSS2_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_3 \Delta IKSS3_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_4 \Delta IKSS4_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_5 \Delta IKSS5_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_6 \Delta IKSS6_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_7 \Delta IKSS7_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_8 \Delta IKSS8_{t-i} + ECM_{t-1} + e_t \quad (2)$$

di mana β adalah volatilitas dalam jangka pendek dan suku koreksi kesalahan menunjukkan seberapa cepat keadaan kembali ke titik stabil setelah periode sebelumnya mengalami guncangan. Suku koreksi kesalahan biasanya berada di antara -1 dan 0.

Model kedua untuk mengungkap arah kausalitas antara indeks kapasitas fiskal, pendapatan termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, diselidiki dengan menerapkan pendekatan kausalitas Granger VECM setelah mengkonfirmasi kointegrasi antar variabel. Menurut Granger (1969), model koreksi kesalahan vektor (VECM) lebih tepat untuk memeriksa kausalitas antar seri jika variabel terintegrasi dalam I (1). VECM adalah bentuk terbatas dari vektor autoregresif tak tentu dan pembatasan diberlakukan jika terdapat hubungan jangka panjang antar seri. Sistem model koreksi kesalahan (ECM) menggunakan semua seri secara endogen. Sistem ini memungkinkan variabel yang diprediksi untuk menjelaskan dirinya sendiri baik melalui lag-nya sendiri maupun indol dari variabel gaya, serta dalam istilah koreksi kesalahan dan dalam hal residual. Persamaan VECM disajikan sebagai berikut:

$$(1 - \beta) \begin{bmatrix} IKSS1 \\ IKSS2 \\ IKSS3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^p (1 - \beta) \begin{bmatrix} \delta_{11i} & \delta_{12i} & \delta_{13i} \\ \gamma_{21i} & \gamma_{22i} & \gamma_{23i} \\ \varphi_{31i} & \varphi_{32i} & \varphi_{33i} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} IKSS1_{t-i} \\ IKSS2_{t-i} \\ IKSS3_{t-i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega \\ \theta \\ \mu \end{bmatrix} ECT_{t-1} + \begin{bmatrix} \rho_{1t} \\ \rho_{2t} \\ \rho_{3t} \end{bmatrix} \quad (3)$$

2026

ANALISIS CSF PENINGKATAN KINERJA





TERIMA KASIH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

